

**INSTABILITAS POLITIK IRAK PASCA MASA KEPEMIMPINAN
SADDAM HUSSEIN 2003-2022**

SKRIPSI



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Oleh:

ACHMAD DANIEL NURULLAH

NIM.A02219003

PROGRAM STUDI SEJARAH PERADABAN ISLAM

FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Achmad Daniel Nurullah
NIM : A02219003
Program Studi : Sejarah Peradaban Islam
Fakultas : Adab dan Humaniora
Universitas : UIN Sunan Ampel

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

Instabilitas Politik Irak Pasca Masa Kepemimpinan Saddam Hussein 2003-2022
adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan hasil plagiat atau saduran dari skripsi orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiat atau saduran dari skripsi lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 27 - 6 - 2023

membuat pernyataan



Achmad Daniel Nurullah
NIM. A02219003

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

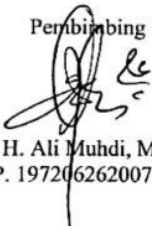
**INSTABILITAS POLITIK IRAK PASCA MASA KEPEMIMPINAN
SADDAM HUSSEIN 2003-2022**

oleh
Achmad Daniel Nurullah
NIM. A02219003

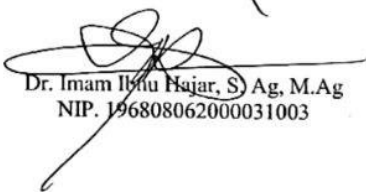
Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji di depan dewan penguji pada
Program Studi Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab dan Humaniora
UIN Sunan Ampel Surabaya

Surabaya, 27/8/2023

Pembimbing 1


H. Ali Muhdi, M.Si.
NIP. 197206262007101005

Pembimbing 2


Dr. Imam Ibnu Hajar, S. Ag, M. Ag
NIP. 196808062000031003

Mengetahui,
Ketua Program Studi Sejarah Peradaban Islam


Dr. Nyong Eka Teguh Imam Santoso, M.Fil.I
NIP. 197612222006041002

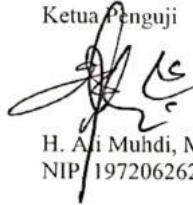
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Instabilitas Politik Irak Pasca Masa Kepemimpinan Saddam Hussein 2003-2022** yang disusun oleh Achmad Daniel Nurullah (NIM. A02219003) telah dipertahankan di depan Dewan Penguji sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Humaniora (S.Hum.) pada Program Studi Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Ampel Surabaya.

Surabaya, 11-7-2023

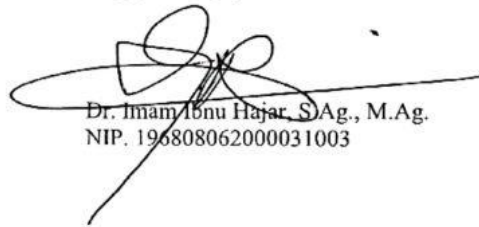
Dewan Penguji:

Ketua Penguji



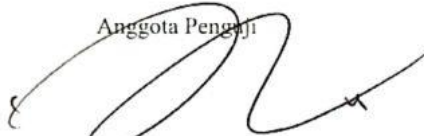
H. Aji Muhdi, M.Si
NIP. 197206262007101005

Anggota Penguji



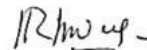
Dr. Imam Ibnu Hajar, S.Ag., M.Ag.
NIP. 196808062000031003

Anggota Penguji



Prof. Dr. H. Abd. A'la, M.Ag
NIP. 195709051988031002


Anggota Penguji



Rochimah, M.Fil.I
NIP. 196911041997032002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Adab dan Humaniora
UIN Sunan Ampel Surabaya



Dr. H. Mohammad Kurjum, M.Ag.
NIP. 196909251994031002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Achmad Daniel Nurullah.....
NIM : A02219003.....
Fakultas/Jurusan : Adab dan Humaniora/ Sejarah Peradaban Islam.....
E-mail address : achmad.daniel21@gmail.com.....

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**INSTABILITAS POLITIK IRAK PASCA MASA
KEPEMIMPINAN SADDAM HUSSEIN 2003-2022**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 19 Juli 2023

Penulis

(Achmad Daniel Nurullah)

ABSTRAK

Achmad Daniel Nurullah (2023). Instabilitas Politik Irak Pasca Masa Kepemimpinan Saddam Hussein 2003-2022). Skripsi Program Studi Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Dosen Pembimbing: (1) H. Ali Muhdi, M.Si. (2) Dr. Imam Ibnu Hajar, S.Ag, M.Ag.

Penelitian berjudul Instabilitas Politik Irak Pasca Masa Kepemimpinan Saddam Hussein memiliki 3 bahasan utama yaitu: 1. Bagaimana akar sejarah konflik kepemimpinan Saddam Hussein sebagai pemicu jatuhnya rezim? 2. Bagaimana perkembangan Irak pasca era kepemimpinan Saddam Hussein? 3. Bagaimana Posisi Geopolitik Irak di timur tengah pasca Saddam Hussein?

Penelitian ini menggunakan pendekatan berbasis kepentingan yang digunakan untuk melihat berbagai bentuk dinamika yang terbalut dengan adanya berbagai kepentingan. Teori konflik dari Sartono Kartodirdjo juga digunakan dalam penelitian ini. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Irak pasca era kepemimpinan Saddam Hussein mengalami ketidakstabilan di berbagai sektor secara kontinuitas atau berkelanjutan. Terhitung mulai dari masa transisi hingga masa kini, Irak masih mengalami serangkaian pergolakan yang memberikan dampak buruk bagi stabilitas di berbagai sektor kehidupan Irak.

Kata Kunci: Irak, Saddam Hussein, Pasca Invasi, Konflik.

ABSTRACT

Achmad Daniel Nurullah (2023). Iraqi Political Instability After Saddam Hussein's Leadership Period 2003-2022). Thesis for the History of Islamic Civilization Study Program, Faculty of Adab and Humanities, Sunan Ampel State Islamic University, Surabaya. Supervisors: (1) H. Ali Muhdi, M.Si. (2) Dr. Imam Ibnu Hajar, S.Ag, M.Ag.

Keywords: Iraq, Saddam Hussein, Post Invasion, Conflict

The research entitled Iraqi Political Instability After Saddam Hussein's Leadership Period has 3 main discussions, namely: 1. How is the historical root of Saddam Hussein's leadership conflict as the trigger for the fall of the regime? 2. How is the development of Iraq after the era of Saddam Hussein's leadership? 3. What is Iraq's Geopolitical Position in the Middle East after Saddam Hussein?

This study uses an interest-based approach that is used to see various forms of dynamics that are wrapped by the existence of various interests. The conflict theory from Sartono Kartodirdjo is also used in this research. The research method used is the method of literature.

Based on the results of the study it can be concluded that Iraq after the era of Saddam Hussein's leadership experienced instability in various sectors continuously or continuously. Starting from the transition period to the present, Iraq is still experiencing a series of upheavals that have had a negative impact on stability in various sectors of Iraqi life.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Dalam	ii
Lembar Persetujuan	iii
Lembar Pengesahan Skripsi	iv
Pernyataan Keaslian Skripsi	v
Persetujuan Publikasi	vi
Kata Pengantar	vii
Lembar Persembahan	ix
Motto	xi
Abstrak	xii
Abstract	xiii
Daftar Isi	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Pendekatan dan Kerangka Teori	7
F. Penelitian Terdahulu	9
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Pembahasan	21

BAB II AKAR SEJARAH KONFLIK ERA SADDAM HUSSEIN SEBAGAI PEMICU TUMBANGNYA REZIM

A. Akar Konflik Irak Pada Rezim Kepemimpinan Saddam Hussein	24
1. Konflik Dengan Iran	25
2. Invasi Kuwait	28
B. Invasi Amerika Serikat	32
1. Tertangkapnya Saddam Hussein	34
2. Persidangan dan Hukuman Bagi Saddam Hussein	36
C. Kondisi Irak Pasca Invasi	40
1. Kondisi Politik Pasca Invasi	40
2. Kondisi Sosial dan Keamanan Pasca Invasi	45
3. Kondisi Ekonomi Pasca Invasi	51

BAB III PERKEMBANGAN IRAK PASCA ERA KEPEMIMPINAN SADDAM HUSSEIN

A. Perkembangan Irak pada era Presiden Ghazi Al-Yawer (2004-2005)	55
1. Konsolidasi Politik dan Rekonsiliasi Nasional	56
2. Penanganan Konflik Sektarian dan Tantangan Keamanan	59
3. Pemulihan Ekonomi dan Rekonstruksi Infrastruktur	61
B. Perkembangan Irak pada era Presiden Jalal Talabani (2005-2014)	62
1. Konsolidasi Politik dan Proses Demokrasi	62
2. Rekonsiliasi Nasional dan Tantangan Keamanan	65

3. Transformasi Ekonomi	66
C. Perkembangan Irak pada era Presiden Fuad Masum (2014-2018).....	67
1. Dinamika Politik Irak	68
2. Perbaikan Aspek Sosial dan Tantangan Keamanan dari ISIS	69
3. Transformasi Ekonomi Irak	72
D. Perkembangan Irak pada era Presiden Barham Salih (2018-2022).....	73
1. Rekonstruksi Politik	73
2. Transformasi Sosial dan Tantangan Keamanan	76
3. Pemulihan Ekonomi	77

BAB IV POSISI GEOPOLITIK IRAK DI TIMUR TENGAH PASCA ERA SADDAM HUSSEIN

A. Bentuk Dukungan dari Berbagai Negara-Negara Tetangga.....	79
1. Implementasi Bantuan dan Dukungan Pada Era Jalal Talabani	80
2. Pengoptimalan Bantuan dan Dukungan Pada Era Fuad Masum	82
3. Barham Salih Dalam Menyikapi Bantuan dan Dukungan	85
B. Pemulihan Hubungan Diplomasi.....	89
1. Upaya Pemulihan Hubungan Diplomasi Pada Masa Jalal Talabani	90
2. Kebijakan Fuad Masum Dalam Pemulihan Hubungan Diplomasi	93
3. Upaya Barham Salih Dalam Memperbaiki Hubungan Diplomasi Irak ..	95
C. Isu Politik yang Muncul di Irak dari Masa Transisi Hingga masa kini.....	97
1. Tantangan Keamanan Irak Pada Era Transisi Ghazi al-Yawer	97
2. Konstelasi Politik Pada Periode Kedua Jalal Talabani	98
3. Konflik Dengan ISIS Pada Periode Fuad Masum	100
4. Reunifikasi Irak dan Iran Pada Periode Barham Salih	101

BAB V PENUTUP

1. Kesimpulan.....	103
2. Saran.....	104

DAFTAR PUSTAKA	105
-----------------------------	-----

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Politik dan negara adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Dua hal tersebut layaknya rokok dan korek, tidak dapat dipisahkan karena saling berhubungan dan saling membutuhkan. Di setiap negara akan selalu ada gejolak politik, gejolak yang terjadi pun beraneka ragam dan selalu memunculkan dampak, dan dampak tersebut akan berpengaruh ke berbagai aspek-aspek kehidupan seperti aspek sosial, politik, ekonomi dan lain sebagainya, dapat diambil contoh seperti negara Irak, negara tersebut awalnya adalah sebuah negara dengan sistem pemerintahan monarki. Namun, pada tahun 1958 Irak merubah sistem pemerintahan menjadi republik, hal tersebut adalah bagian dari konstelasi politik yang terjadi di Irak.¹

Setelah menjadi negara republik, Irak selalu mengalami berbagai rentetan peristiwa-peristiwa politik, sosial dan lain sebagainya. Mulai dari konflik internal dan juga konflik luar negeri. Salah satu konflik yang selalu melekat bagi Irak adalah konfliknya dengan Amerika Serikat yang dipicu oleh invasi yang dilakukan Irak ke Kuwait. Hal yang melatarbelakangi Irak melakukan invasi disebabkan kondisi ekonomi internal Irak yang saat itu sedang rancu akibat perang berkepanjangan dengan Iran.²

¹ Hans J. Nissen dan Peter Heine, "From Mesopotamia to Iraq: A Concise History", (London: I.B. Tauris, 2009), 154.

² Yussuf Solichien M., "Kerjasama PBB-Amerika Serikat dalam Penyelesaian Kasus Invasi Irak Terhadap Kuwait (Tahun 1990-1991)", (Tesis, Universitas Indonesia Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jakarta, 2008), th.

Seperti yang diketahui, terdapat sosok Saddam Hussein yang merupakan Presiden Irak yang mempunyai tanggung jawab besar atas berbagai rentetan peristiwa yang dialami oleh Irak. Di masa kepemimpinan Saddam, Irak sangat ditakuti oleh negara-negara tetangga bahkan PBB dan Amerika Serikat pun harus ikut andil turun tangan untuk mengatasi problematika yang sedang terjadi di kawasan teluk timur tengah. Hal yang melandasi PBB dan Amerika untuk ikut andil dalam mengurus konflik yang terjadi di kawasan teluk bukan serta merta hanya karena perkara invasi yang dilakukan Irak ke Kuwait, akan tetapi ada beberapa sumber perkara yang menjadi identifikasi bahwasannya Irak telah melakukan kesalahan fatal yang menyebabkan PBB dan Amerika untuk turun tangan mengakhiri konflik di Irak.³

Terdapat beberapa kebijakan-kebijakan kontroversial yang direalisasikan Saddam Hussein sebagai Presiden Irak, mulai dari menggunakan senjata pemusnah masal, otoritarianisme Saddam Hussein, hingga sampai dengan masalah invasi yang dilakukan Irak terhadap negara tetangga yaitu Kuwait. Namun terungkap narasi senjata pemusnah massal yang dituding oleh Amerika ke Irak, hal tersebut masih menjadi isu yang belum terpecahkan, sebab hingga saat ini belum ditemukan bukti-bukti bahwa Irak memproduksi senjata pemusnah massal tersebut dan hal tersebut hanya sebuah opini yang dibuat oleh Amerika Serikat.⁴

³ Budi Winarno, "Satu dekade Pasca Invasi AS di Irak", *Jurnal Hubungan Internasional*, Vol.3 No. 2 (Oktober, 2014), 108

⁴ Delfian Effendi, "Motivasi Amerika Serikat Dalam Pengiriman Pasukan Academi LLC Ke Irak 2011", (Skripsi, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang, 2015), 1-2.

Atas berbagai tuduhan-tuduhan yang dilayangkan ke Saddam Hussein. Akhirnya Saddam Hussein ditangkap pada maret 2003, dalam operasi invasi Irak yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Pasca ditangkapnya Saddam Hussein, kondisi Irak yang diprediksi akan membaik ternyata semakin memburuk. Huru-hara yang terjadi di Irak semakin pecah diakibatkan timbulnya konflik dari golongan yang pro dan kontra terhadap Saddam Hussein.⁵ Peristiwa ditangkapnya Saddam Hussein juga berpengaruh dalam segala aspek yang ada di Irak, mulai dari aspek sosial yang mengakibatkan perpecahan golongan di Irak hingga kelompok ekstrimis yang mulai muncul ke permukaan. Aspek ekonomi juga terdampak karena pada saat itu Irak mengalami inflasi dan dalam sektor politik di Irak juga memanas untuk memperebutkan kursi kosong yang ditinggalkan Saddam Hussein.

Pada momen kekosongan pemimpin tersebut, Amerika mengambil peran untuk ikut andil menentukan perihal siapa yang akan menjadi pengganti Saddam Hussein dan meminta agar mempercepat proses pemilihan presiden.⁶ Irak mengalami krisis identitas pemimpin negara mulai dari tahun 2003 (saat Saddam Hussein ditangkap) hingga sampai tahun 2006, yang pada tahun tersebut Saddam Hussein divonis hukuman gantung oleh pengadilan kriminal Irak khusus yang pada saat itu ditunjuk oleh otoritas pemerintahan Irak yang didukung oleh Amerika Serikat.⁷

⁵ Charles J. Shields, "Saddam Hussein Major World Leaders", (Philadelphia: Chelsea House Publisher, 2005), 133-137.

⁶ Ibid, 136.

⁷ Ratih Gumilang, "Tinjauan Hukum Humaniter Terhadap Genosida Pada Suku Kurdi Di Irak Selama Rezim Saddam Hussein", (Tesis, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Jakarta, 2015), 85.

Lalu, bagaimana kondisi Irak pasca kematian dari Saddam Hussein? pasti semua kemungkinan-kemungkinan yang dinarasikan oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam menggulingkan rezim Saddam Hussein tidak menjadi kenyataan. Hal tersebut dikarenakan semua yang dijadikan tujuan terkait peristiwa digulingkannya Saddam Hussein tidak benar-benar terealisasi. Mulai dari stabilitas yang terjadi di Irak tidak pernah terjadi di negara mayoritas Muslim tersebut, bahkan kondisi di Irak sangat amburadul dan jauh dari kata stabil.

Munculnya kelompok separatis yang mengambil alih pemerintahan Irak yang mungkin mayoritas orang menyebutnya dengan ISIS (Islamic State of Iraq and Suriah). Kelompok tersebut muncul dikala Irak sedang mengalami masa perkembangan demokrasi. Perlu diketahui bahwasannya Irak benar-benar mengalami fase kemunduran karena dampak dari rentetan konflik-konflik yang terjadi pada masa kepemimpinan Saddam Hussein.⁸

Pasca digulingkannya rezim pemerintahan Saddam Hussein hingga tahun 2022, Irak mengalami beberapa pergantian kepemimpinan negara, yakni ada 4 sosok yang bergantian mengisi kursi Presiden Republik Irak. Namun yang selalu menjadi pertanyaan, seperti apa kondisi yang dialami Irak ketika dipimpin oleh Presiden yang baru, karena tidak dapat dipungkiri bahwasannya Irak seperti hilang ditelan bumi pasca ditinggalkannya sosok Saddam Hussein. Irak sangat jarang diliput oleh media-media mainstream dunia, yang selalu terliput hanyalah

⁸ Fernando PM Tambunan, "Sejarah dan Ideologi ISIS (Islamic State Of Iraq And Sham)", (Jurnal, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2014), 1.

konflik-konflik yang terjadi di Irak yang memang sekarang sedang dikuasai oleh kelompok ekstremis ISIS. Hubungan diplomasi Irak di berbagai negara-negara juga jarang terlihat hingga memunculkan berbagai spekulasi, ada apa sebenarnya dengan Irak, seperti apa kondisi yang sedang terjadi di Irak mulai dari aspek sosial, politik, ekonomi, keamanan serta hubungan diplomatik dengan berbagai negara.

Berdasarkan pemaparan diatas, yang menjadikan alasan utama peneliti tertarik untuk mengkaji lebih spesifik mengenai kondisi Irak pasca era kepemimpinan Saddam Hussein, sebagai jawaban yang setidaknya melegakan dahaga terkait problematika yang terjadi di negara Irak saat ini, sebab tidak dapat dipungkiri Irak seperti kehilangan taringnya sebagai negara Muslim yang sangat disegani, hal itu disebabkan super power Irak pada akhir periode abad 20 yang pada saat itu Irak dibawah era kepemimpinan Saddam Hussein. Adapun dalam hal ini penulis berinisiatif menuangkannya menjadi sebuah karya tulis ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul “Instabilitas Politik Irak Pasca Masa Kepemimpinan Saddam Hussein”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis dapat menyimpulkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Akar Sejarah Konflik Kepemimpinan Saddam Hussein sebagai Pemicu Tumbangnya Rezim?
2. Bagaimana perkembangan Irak pasca era kepemimpinan Saddam Hussein?

3. Bagaimana posisi Irak secara geopolitik di timur tengah pasca era kepemimpinan Saddam Hussein?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, dibawah ini merupakan tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui akar permasalahan tumbangnya rezim Saddam Hussein.
2. Untuk mengetahui kondisi perkembangan Irak pasca era kepemimpinan Saddam Hussein.
3. Untuk mengetahui posisi geopolitik Irak di timur tengah pasca era kepemimpinan Saddam Hussein.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi para pembaca, terutama bagi para akademisi dalam 2 manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah referensi ilmiah dan pengetahuan mengenai literasi bagi para akademisi tentang ilmu sejarah, serta menjadi penguat konsep-konsep maupun teori terkait dinamika yang terjadi di Irak pasca era kepemimpinan Saddam Hussein.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menyelesaikan sebuah problematika penelitian dengan membandingkan, memperkuat serta menambah kajian agar dapat dijadikan sebagai referensi pada penelitian selanjutnya. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan rujukan

bagi mahasiswa dalam memahami, mengetahui serta menambah wawasan terkait Negara Irak pasca era kepemimpinan Saddam Hussein.

E. Pendekatan dan Kerangka Teori

Seperti penelitian pada umumnya, dalam karya tulis ilmiah pasti membutuhkan yang namanya sebuah pendekatan, sebab pendekatan memiliki peran penting dalam hasil penelitian karya tulis ilmiah. Apabila penelitian tidak menggunakan pendekatan, maka karya tulis atau penelitian yang dihasilkan akan kurang maksimal. Seperti halnya dengan penelitian ini, penelitian yang berjudul “Instabilitas Politik Irak pasca masa kepemimpinan Saddam Hussein 2003-2022” akan menggunakan pendekatan berbasis kepentingan, sebab hal tersebut relevan dengan apa yang akan terjadi di Irak dan cocok untuk peneliti gunakan sebagai pendekatan. Rasionalisasi dari peneliti menggunakan pendekatan berbasis kepentingan tidak luput dari realita yang ada mengenai kepentingan dari Saddam Hussein yang menggunakan kebijakannya untuk mempertahankan posisinya sebagai orang nomor satu di Irak.

Hal tersebut selaras dengan Amerika Serikat, dengan adanya kepentingan Amerika menginvasi Irak disinyalir adalah untuk menggulingkan rezim Saddam Hussein yang menurut Amerika Serikat merupakan rezim yang kejam, namun tidak mungkin apabila hanya hal tersebut yang menjadi landasan serta alasan Amerika Serikat untuk menginvasi Irak, pasti terdapat kepentingan lain dibelakangnya. Pendekatan berbasis kepentingan menyoroti pentingnya dalam memahami perihal kepentingan mendasar dari individu serta kelompok dalam upaya terciptanya resolusi konflik. Perkara tersebut juga menekankan

bahwa konflik seringkali timbul akibat adanya ketidakpuasan dari pemangku kebijakan, yang mengakibatkan konflik berkepanjangan di Irak.⁹

Apabila berbicara perihal konflik, pada dasarnya kehidupan tidak akan pernah luput dari yang namanya konflik. Adanya sebuah kedamaian tidak lantas membuat konflik dan perselisihan hilang begitu saja dari kehidupan manusia. Bahkan terkadang untuk mendapatkan kedamaian dalam kehidupan harus melalui mekanisme atau tahapan yang bernama konflik untuk mendapatkannya. Namun terdapat hal yang paling penting, yaitu mengambil hikmah dan menjadikannya sebuah pembelajaran atau proyeksi dari setiap peristiwa untuk kehidupan yang lebih baik di masa mendatang.

Hal yang serupa dirasakan oleh Irak, sebuah negara yang harus menerima kenyataan bahwasannya negara tersebut terlalu sibuk dengan konflik-konflik yang berkepanjangan. Menurut Sartono Kartodirdjo, konflik adalah suatu benturan antara kelompok maupun individu yang memiliki sebuah kepentingan dan tujuan yang saling bertentangan. Dalam konteks Irak saat atau pasca dipimpin oleh Saddam Hussein, konflik dapat dilihat sebagai sebuah hasil dari adanya interaksi sosial antara berbagai kelompok etnis, agama maupun politik yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang berbeda.¹⁰

Teori konflik dari Sartono Kartodirdjo menekankan perlunya memahami sebuah konflik. Dengan adanya perubahan politik di Irak setelah digulingkannya

⁹ Kevin Avruch and Christopher Mitchell, "Conflict Resolution and Human Needs", (Canada: Routledge Group, 2013), 130-132.

¹⁰ Sartono Kartodirdjo, "Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah", (Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 1992), 148-149.

Saddam Hussein yang mengakibatkan kekosongan kekuasaan yang memicu adanya persaingan antar kelompok yang berupaya untuk mengisi kekosongan kekuasaan tersebut. Selain itu, konflik adalah sebuah komponen utama dari adanya perubahan sosial, hal tersebut relevan dengan kondisi di Irak pasca Saddam Hussein yang mempengaruhi dinamika politik, kehidupan masyarakat dan tatanan sosial di Irak. konflik tersebut telah menimbulkan adanya perubahan dalam sistem politik di Irak yang mengakibatkan adanya pemerintahan baru, pergeseran kekuasaan dan upaya rekonsiliasi antar kelompok yang terlibat dalam konflik.¹¹

F. Penelitian Terdahulu

Setelah memakan waktu yang cukup panjang untuk menemukan penelitian dan karya ilmiah yang serupa, pada akhirnya peneliti menemukan beberapa penelitian atau karya ilmiah yang dapat dikatakan ada kesamaan pada objek dan juga tema, seperti sama-sama menggunakan Irak sebagai objek penelitian dan secara kondisi kudeta Saddam Hussein digunakan sebagai tema, namun secara pendekatan, pengolahan kata, penyelesaian masalah dan segala macam kesinambungannya dapat dikatakan berbeda. Pada penelitian ini, urgensi bagi peneliti ialah melakukan kajian terhadap penelitian atau karya ilmiah terdahulu agar supaya menghindari pengulangan, kesamaan serta sebagai acuan dan pembanding dalam penelitian ini, maka untuk lebih jelasnya, penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pembahasan mengenai Irak dan Saddam Hussein antara lain:

¹¹ Ibid, 159.

1. Penelitian Rizma Rizqina Muwahhida. *Sejarah Irak: Kesejajaran Konflik di Irak dalam Novel MAQTALU BA'TI AL-KUTUB Karya Saad Muhammad Rahim (Kajian New Historicism)*.¹² Hasil dari tesis ini menjelaskan adanya korelasi konflik Irak yang diceritakan oleh sebuah novel dan berita dari berbagai media-media mainstream. Mulai dari konflik ramadan atau kudeta terhadap Abdul Karim Qasim pada tahun 1963 dan kudeta terhadap Saddam Hussein serta konflik-konflik yang melingkupi Irak pada adanya kudeta terhadap Saddam Hussein. Perbedaan dari tesis dan penelitian yang sedang ditulis ini terletak pada fokus penelitian dan metode penelitian. Tesis ini menggunakan teori *New Historicism* dan lebih memfokuskan terhadap isi dalam Novel yang disejajarkan dengan realita konflik-konflik Irak yaitu konflik yang terjadi pada peristiwa kudeta Saddam Hussein. Sedangkan untuk penelitian yang sedang ditulis ini menggunakan metode kepustakaan untuk menggali informasi yang kredibel lalu dituangkan menjadi sebuah narasi ilmiah, dan penelitian ini akan menjelaskan sebuah problematika Irak dengan lebih kompleks mulai dari aspek ekonomi, sosial, politik hingga stabilitas keamanan pasca Saddam Hussein.
2. Penelitian Denny Prasetio Utomo. *Keputusan Saddam Hussein Mempertahankan Posisinya Sebagai Pemimpin Irak*.¹³ penelitian ini berfokus pada personality kepemimpinan Saddam Hussein yang tetap berpegang teguh

¹² Rizma Rizqina Muwahhida, "Sejarah Irak: Kesejajaran Konflik di Irak dalam Novel *MAQTALU BA'TI AL-KUTUB* Karya Saad Muhammad Rahim (*Kajian New Historicism*)", (Yogyakarta : Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga, 2022).

¹³ Denny Prasetio Utomo, "Keputusan Saddam Hussein Mempertahankan Posisinya Sebagai Pemimpin Irak", (Jember : Universitas Jember, 2003).

dengan prinsipnya dalam memegang tonggak kepemimpinan Irak. seperti yang dipaparkan dalam Skripsi Denny Prasetio Utomo bahwa meskipun menghadapi Sanksi PBB dan mendapat tekanan-tekanan dari pihak luar agar Saddam Hussein meninggalkan atau turun pada kursi jabatannya. Akan tetapi, Saddam Hussein sama sekali tidak gentar dan tetap keukeuh pada pendiriannya.

Persamaan dari skripsi Denny dan penelitian ini terdapat pada Objek yang diteliti, yaitu Saddam Hussein dan Irak sebagai objek penelitian. Akan tetapi, kajian pembahasan dari skripsi yang ditulis oleh Denny lebih terfokus kepada kebijakan Saddam Hussein dalam mempertahankan posisinya sebagai Presiden. Sedangkan Fokus Penelitian ini lebih tertuju kepada problematika dan runtutan konflik-konflik yang dihadapi Irak pasca era kepemimpinan Saddam Hussein, serta bagaimana kondisi yang dialami pemerintahan, masyarakat Irak pada waktu itu.

3. Penelitian Vergie Winanda. *Sejarah Perkembangan Partai Baath di Irak Pada Masa Kepemimpinan Saddam Hussein Tahun 1979-2003*.¹⁴ Hasil dari penelitian yang dikemukakan oleh Vergie adalah perkembangan partai baath dan perjalanan yang dilalui oleh partai baath. Mulai dari pembentukan serta runtutan dinamika yang dihasilkan oleh partai baath serta keterkaitannya Saddam Hussein dalam kudeta yang dilakukan oleh partai baath pada juli

¹⁴ Vergie Winanda, Ajat Sudrajat., "Sejarah Perkembangan Partai Baath di Irak Pada Masa Kepemimpinan Saddam Hussein Tahun 1979-2003", (Yogyakarta : Universitas Negeri Yogyakarta, 2015)

tahun 1968 untuk menggulingkan Presiden Irak pada waktu itu, yaitu Abdul Rahman Arif. Peristiwa itu dikenal dengan revolusi juli.

Persamaan antara skripsi ini dengan penelitian yang sedang dalam proses pengerjaan ini terletak pada objek penelitian. Sama-sama menggunakan Saddam Hussein sebagai objek penelitian, tetapi skripsi ini lebih memfokuskan partai baath pada era kepemimpinan Saddam Hussein sebagai objek penelitian dan juga membahas hubungan antara partai baath dan Saddam Hussein dalam konflik yang terjadi. Lalu perbedaan terletak pada aspek waktu dan sudut pandang terhadap objek penelitian, sebagaimana telah dijelaskan bahwasannya penelitian ini menempatkan aspek waktu pada pasca kematian Saddam Hussein dan sudut pandang lebih dituju terhadap konflik-konflik yang dialami Saddam Hussein pasca hukuman gantung.

4. Penelitian Mahyunani Arifin. *Intervensi Amerika Serikat Pada Sektor Ekonomi & Politik dalam Pemerintahan Sementara Irak Pasca Saddam Hussein*.¹⁵ Hasil dari skripsi ini adalah membahas peran Amerika Serikat pada sektor ekonomi dan politik pada masa pemerintahan sementara Irak yang pada saat itu mengalami kekosongan kursi kePresidenan akibat invasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat yang menyebabkan turunnya Saddam Hussein dari kursi kepresidenan Irak. Amerika menganggap bahwa kepemimpinan Saddam Hussein dinilai sangat otoriter dan hal ini dianggap sebagai kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat. Amerika Serikat

¹⁵ Mahyunani Arifin, "Intervensi Amerika Serikat Pada Sektor Ekonomi & Politik dalam Pemerintahan Sementara Irak Pasca Saddam Hussein", (Malang : Universitas Muhammadiyah Malang, 2011).

merasa ikut bertanggung jawab atas rekonstruksi ulang Irak pasca digulingkannya Saddam Hussein, maka dari itu AS ikut serta dalam sektor ekonomi dan politik Irak.

Secara garis besar skripsi ini lebih spesifik pada sektor ekonomi dan politik, serta keikutsertaan Amerika dalam urusan internal Irak. Secara objek skripsi dan penelitian ini sama-sama menggunakan Irak dan Saddam Hussein sebagai objek penelitian. Namun terdapat perbedaan dari skripsi dengan karya tulis ini, perbedaannya terletak pada aspek waktu. Skripsi yang ditulis oleh saudari mahyuni hanya berfokus dalam kurun waktu 2003-2005 yang pada dasarnya kondisi awal Irak pasca meletusnya konflik akibat digulingkannya Saddam Hussein, sedangkan peneliti akan lebih kompleks menjabarkan dalam aspek waktu yaitu mulai dari 2003 sampai pada tahun 2022 yang pasti membahas berbagai lini di Irak pasca era kepemimpinan Saddam Hussein.

5. Penelitian Imam Kurniawan. *Kepentingan Amerika Serikat dalam Invasi Irak Tahun 2003*.¹⁶ dari penelitian ini menghasilkan beberapa alasan kepentingan amerika dalam invasi ke Irak. Invasi yang dilakukan oleh Amerika adalah pengaruh dari kelompok elit Amerika yang dinamakan dengan *Zionist Power Configuration (ZPC)* dan *American Israel Public Affairs Committee (AIPAC)* yang bermula dari obsesinya Amerika untuk eksistensi dan menjaga Israel dari ancaman Irak. Mulai dari metode dan pendekatan yang digunakan oleh skripsi ini, lebih memfokuskan serta menggunakan pendekatan kualitatif serta

¹⁶ Imam Kurniawan, "Kepentingan Amerika Serikat dalam Invasi Irak Tahun 2003", (Malang : Universitas Muhammadiyah Malang, 2011).

teori yang digunakan ialah, *Pre-emptive Strike* dan Teori elit (Elit Politik dan Elit Ekonomi). dikarenakan teori yang digunakan sesuai dengan apa yang dijadikan fokus pembahasan, mulai dari permasalahan-permasalahan yang terjadi serta latar belakang konflik yang dirasa sangat cocok apabila menggunakan pendekatan dan teori yang dikemukakan di atas.

6. Penelitian Budi Winarno. *Satu Dekade Pasca Invasi AS di Irak*.¹⁷ Jurnal ini secara garis besar membahas kondisi Irak pasca invasi yang dilakukan Amerika selama satu dekade. Dijelaskan di dalam jurnal bahwasannya pasca satu dekade invasi yang dilakukan Amerika Serikat masih menyisakan beberapa persoalan, yaitu: Pertama, menyangkut aspek legalitas serangan yang dilakukan AS ke Irak. Kedua, Motivasi apa yang ada di dalam benak AS serta George Bush sendiri, karena dapat dilihat bahwa kuatnya keinginan George Bush untuk menginvasi Irak dan menggulingkan rezim kepemimpinan Saddam Hussein. Ketiga, Perang ini ada korelasi dengan ambisi AS sebagai negara Super Power di dunia sehingga tidak ingin setiap kepentingan yang dimiliki oleh AS dihambat atau dihalangi oleh siapapun. Terakhir, Terjadinya ancaman bagi kepentingan Amerika Serikat dari Negara-Negara yang tidak sejalan dengan Amerika itu sendiri.

Melihat apa yang dipaparkan oleh jurnal diatas dapat disimpulkan pemaparan tersebut lebih difokuskan pada kondisi demokratis yang ada pada Irak pasca satu dekade invasi yang dilakukan Amerika Serikat. Lalu

¹⁷ Budi Winarno, "Satu Dekade Pasca Invasi AS di Irak", (Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada, 2014).

perbedaan antara Jurnal dan Skripsi ini terletak pada aspek waktu pembahasan yang setidaknya memberikan penambahan atau keluasan perihal kondisi terbaru yang ada di Irak mulai dari kondisi politik, ekonomi, sosial, dan keamanan dari tahun 2003 hingga 2022.

G. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library Research), yang merupakan serangkaian proses terkait dengan metode mencari dan mengumpulkan data dari berbagai sumber-sumber tertulis, membaca dan menulis catatan dari sumber data tersebut, yang kemudian diolah menjadi informasi sebagai bagian dari penelitian tersebut.¹⁸ Secara garis besar, penelitian kepustakaan tidak memerlukan data dan riset lapangan, karena hanya berfokus pada koleksi sumber data dari perpustakaan.¹⁹ Secara umum, dalam karya tulis ilmiah harus menggunakan perpaduan dari riset pustaka dan riset lapangan atau menekankan salah satu diantaranya. Namun, untuk meneliti Instabilitas Politik Irak pasca era kepemimpinan Saddam Hussein. Penulis lebih memilih menggunakan metode penelitian pustaka dikarenakan ada beberapa alasan yang melandasi penulis memilih penelitian pustaka.

Pertama, sumber perkara dari penelitian hanya mampu dijawab melalui penelitian pustaka, sebab riset lapangan sangat tidak memungkinkan bagi penulis untuk merealisasikan dikarenakan biaya operasional dan kondisi

¹⁸ Zed Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta : yayasan obor Indonesia, 2004), 3.

¹⁹ *Ibid*, 4

keamanan di Irak yang hingga saat ini tidak memungkinkan. Kedua, riset pustaka diperlukan sebagai tahapan awal untuk memahami fenomena yang sedang berkembang di masyarakat, dan yang ketiga, sumber data pustaka sangat mampu diandalkan untuk menjawab berbagai masalah penelitian.²⁰

Beberapa tahapan yang ada di dalam penelitian kepustakaan meliputi mencari ide secara umum terkait penelitian yang akan dilakukan, menentukan fokus penelitian yang lebih spesifik, mencari informasi yang konkrit untuk topik penelitian, menyusun catatan dan juga bahan-bahan yang telah dikumpulkan, memperbanyak literasi bacaan dengan melakukan review lebih lanjut dan mengorganisir catatan untuk memulai penelitian.²¹

1. Menggali Ide Umum Penelitian

Secara umum, ide umum merujuk pada pemahaman atau penangkapan pokok pikiran mengenai suatu peristiwa tertentu. Konsep atau ide umum merupakan sebuah gambaran abstrak mengenai sesuatu hal secara umum, yang berkemungkinan kita agar dapat membedakan ciri khasnya dari yang lain. Konsep ini berisi sebuah karakteristik umum atau tanda dari suatu hal. Pada penelitian yang dilakukan ini, peneliti mengangkat ide umum kondisi Irak pasca era kepemimpinan Saddam Hussein.

2. Mempertegas Fokus Penelitian

Pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini memiliki batasan dalam pembahasannya, yang berfokus pada Irak pasca era kepemimpinan

²⁰ Ibid, 5.

²¹ Ibid, 81.

Saddam Hussein dan tidak akan terlalu melebar luas hingga ke latar belakang masa berdirinya Irak dan pergolakan-pergolakan yang terjadi di Irak terutama pada masa era kepemimpinan Saddam Hussein. Tidak, peneliti memfokuskan pembahasan hanya pada Irak pasca era kepemimpinan Saddam Hussein dan bagaimana kondisi hingga perkembangan Irak pasca era Saddam Hussein. Namun, apabila diteliti lebih lanjut, penulis tetap mencantumkan konflik Irak yang berada di bawah kepemimpinan Saddam Hussein. Namun hanya membahas terkait peristiwa konflik dengan Iran dan Kuwait, hal tersebut disebabkan karena dua peristiwa tersebut adalah akar dari permasalahan tumbangannya rezim Saddam Hussein.

3. Mencari Informasi Yang Mendukung Topik Penelitian

Adapun sumber informasi sebagai pelengkap yang berasal dari berbagai buku dan jurnal-jurnal serta beberapa artikel yang ditulis oleh para penulis barat, namun dirasa kurang objektif apabila peneliti hanya menggunakan buku, artikel, atau jurnal yang bersifat subjektif. Dengan demikian peneliti berupaya menggunakan berbagai sumber yang dirasa objektif, walaupun tidak objektif peneliti akan menggunakannya dengan membandingkan sumber tersebut agar menghasilkan jawaban yang relevan dari problematika yang ada pada karya tulis ilmiah.

4. Mencari dan menemukan bahan bacaan

Pada penelitian yang dilakukan terdapat beberapa bahan bacaan atau sumber yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian, ada 2 sumber yang digunakan, yaitu sumber primer dan sumber sekunder.

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber yang dihasilkan oleh pelaku atau saksi langsung dari sebuah peristiwa sejarah tersebut dan dianggap sebagai sumber utama atau sumber yang paling relevan untuk penelitian. Dalam penelitian skripsi ini, sumber primer yang digunakan meliputi buku, jurnal, dan beberapa artikel yang penulis dari karya tulis tersebut masih sezaman atau ada pada peristiwa dalam penelitian ini :

1. Buku Con Coughlin, *Saddam: His Rise and Fall*, (New York : HarperCollins Publisher, 2005).
2. Buku Joseph Sassoon, *Saddam Hussein's BA'TH PARTY Inside an Authoritarian Regime*, (New York : University Cambridge Press, 2012).
3. Buku Efraim Karsh dan Inari Rautsi, *Saddam Hussein : A Political Biography*, (New York : Grove Press, 2002).
4. Jurnal Divya Malhotra, *From Iraq's Saddam to Saddam's Iraq : The question of legitimacy*, (India : Jawaharlal Nehru University, 2018).
5. Buku Geoff Simons, *Iraq: From Sumer to Saddam*, (London : The Macmillan Press LTD, 1994).

b. Sumber Sekunder

Sumber kedua atau sumber sekunder dalam penelitian ini yang digunakan diantaranya berupa sumber data yang mendukung sumber primer yang diperoleh melalui buku, karya tulis ilmiah, jurnal, skripsi, tesis dan artikel serta dokumen berupa media berita yang ada kaitannya dengan

pembahasan pada penelitian yang sedang dilakukan ini, diantaranya sebagai berikut :

1. Jurnal Budi Winarno, “Satu Dekade Pasca Invasi AS di Irak”, (Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada, 2014).
2. Tesis Azman Ridha Zain, “Realitas di balik Konflik Amerika Serikat-Irak : Analisis terhadap Invasi AS ke Irak”, (Depok : Universitas Indonesia, 2004).
3. Skripsi Vergie Winanda, “Sejarah Perkembangan Partai Baath di Irak Pada Masa Kepemimpinan Saddam Hussein Tahun 1979-2003”, (Yogyakarta : Universitas Negeri Yogyakarta, 2015).
4. Buku Hans J. Nissen dan Peter Heine, “*From Mesopotamia to Iraq*”, (London : Universitas Chicago Press, 2009).
5. Skripsi Mahyuni Arifin, “Intervensi Amerika Serikat pada Sektor Ekonomi dan Politik dalam pemerintahan Sementara Irak pasca Saddam Hussein”(Malang, 2011).

Perihal sumber primer dan sekunder, peneliti mendapatkannya dari media elektronik atau internet. peneliti mendownload secara gratis, akan tetapi peneliti teramat sangat sadar atas konsekuensi mendownload sumber data secara gratis. Peneliti sadar atas resiko dan bahaya, mulai dari virus-virus data yang secara tidak langsung juga ikut terbawa ke dalam file-file sumber data yang mungkin akan sangat berpengaruh terhadap stabilitas laptop. Mungkin kalimat argumentatif dari peneliti bermaksud untuk klarifikasi kenapa peneliti tidak mendapatkan sumber-sumber data dari

media berbayar. Meskipun mendapatkan sumber data secara cuma-cuma, akan tetapi sesuai dengan resiko yang didapat yaitu dengan adanya kemungkinan mengeluarkan biaya kerusakan laptop apabila virus-virus tersebut merambah ke segala penjuru laptop.

5. Reorganisasi Bahan dan Membuat Catatan penelitian

Apabila dirasa sudah mengumpulkan berbagai sumber-sumber yang dibutuhkan dalam penelitian, entah itu sumber primer maupun sumber sekunder. Peneliti perlu melakukan analisis yang merupakan bagian dari proses sistematis untuk mengkaji pokok utama dari permasalahan dalam penelitian dengan memecah informasi menjadi beberapa bagian-bagian atau unit untuk analisis yang terpisah.²²

Langkah awal yang dilakukan untuk analisis adalah melakukan analisis pendahuluan dengan cara memilih data dari buku-buku, jurnal atau artikel Irak dan Saddam Hussein yang terkait dengan problematika yang terjadi di Irak dalam beberapa tahun terakhir ini. Seleksi bahan harus dilakukan dengan cara melakukan kritik sumber atau bahan yang dipilih dan dipilah, sehingga dapat dimasukkan dalam kategori tema sosial dan politik yang dikaji.

Metode kritik teks yang digunakan dalam proses ini mempertimbangkan dengan tiga unsur yaitu teks, konteks dan diskursus. Teks dipilih berdasarkan tema yang ditentukan, sementara konteks melibatkan hubungan antara bahan-bahan yang dipilih dari situasi yang mempengaruhi

²² Ibid, 70.

pembuatan bahan tersebut. Diskursus atau wacana lebih digunakan untuk memahami maksud dari teks dan konteks, baik yang tersirat maupun yang terang-terangan.²³

6. Reorganisasi Bahan kembali dan Memulai Penulisan

Pada tahap ini, yang perlu dilakukan adalah sintesis, sintesis merupakan langkah lanjutan dari analisis. Pada proses ini, sintesis adalah upaya yang dilakukan untuk menggabungkan hasil analisis ke dalam kerangka konstruksi yang dapat dipahami secara menyeluruh.²⁴ Adapun teknik yang perlu untuk dilakukan yaitu sintesis pendahuluan. sintesis pada penelitian ini merupakan langkah untuk memadukan bahan sintesis dan analisis. Tujuannya adalah untuk menata kembali hasil analisis agar dapat menjelaskan berbagai istilah dan makna asli dari hasil riset, dan memeriksa kembali bagian subjektivitas yang mungkin ada dalam hasil riset. Setelah langkah sintesis pendahuluan telah dilakukan, langkah berikutnya adalah melakukan sintesis akhir yang mencakup upaya untuk menggabungkan beberapa bagian dari hasil penelitian secara menyeluruh dengan tahap generalisasi atau tahap penulisan akhir.²⁵

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan deskripsi atau pemaparan rincian-rincian pembahasan dalam penelitian dan keterkaitannya antara bab dan sub bab atau dengan bab lainnya. Maka untuk mempermudah dalam penyusunan, dan

²³ Ibid, 71.

²⁴ Ibid, 76.

²⁵ Ibid, 77.

juga untuk mempermudah para pembaca untuk memahaminya, maka penelitian ini yang membahas mengenai “Instabilitas Politik Irak Pasca era Kepemimpinan Saddam Hussein”, akan diuraikan dalam lima bab pokok yang memiliki keterkaitan satu sama lain. Secara sistematis rincian dari lima bab pokok tersebut, antara lain:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pendekatan dan kerangka teori, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, memaparkan mengenai akar sejarah konflik kepemimpinan Saddam Hussein yang menyebabkan tumbangnya rezim. Setelah itu memaparkan kondisi Irak pasca invasi serta dampak apa saja yang terjadi bagi aspek aspek kehidupan yang ada di Irak, mulai dari aspek sosial, politik, ekonomi dan keamanan.

Bab ketiga, berisi tentang pemaparan apa saja perubahan yang terjadi di Irak pasca Saddam Hussein lengser. Bagaimana juga kondisi sosial, politik, ekonomi dan keamanan Irak dibawah era kepemimpinan presiden setelah Saddam Hussein.

Bab keempat, memaparkan bagaimana kondisi Irak secara geopolitik di timur tengah pada era kepemimpinan presiden pasca Saddam Hussein. Hal tersebut mengerucut mulai dari bentuk dukungan seperti apa yang di dapat Irak dari negara-negara tetangga pasca konflik, dan upaya apa yang dilakukan oleh Irak untuk memulihkan hubungan diplomasi dengan negara tetangga.

Bab kelima, bagian penutup yang didalamnya terdapat kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah hasil akhir yang berupa jawaban singkat dari penelitian ini, berasal dari rumusan masalah yang sebelumnya telah diuraikan. Sedangkan saran, merupakan masukan atau anjuran yang tidak hanya diperuntukan bagi para pembaca namun juga sekaligus masukan bagi para peneliti selanjutnya. Kemudian dilanjut dengan daftar pustaka, yang berisi referensi-referensi yang ikut dalam proses menyelesaikan penelitian ini.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

Akar Sejarah Konflik Kepemimpinan Saddam Hussein

Bab ini bertujuan untuk menjelaskan akar permasalahan konflik Irak pada era kepemimpinan Saddam Hussein serta kondisi awal Irak pasca invasi Amerika Serikat yang mengakibatkan jatuhnya rezim Saddam Hussein pada tahun 2003 M. Invasi tersebut juga mengakhiri rezim kepemimpinan Saddam Hussein yang telah berkuasa dari tahun 1979 M. Tentu bukan waktu yang singkat bagi seorang presiden memimpin sebuah negara demokrasi dengan periode kepemimpinan sepanjang itu. Dengan panjangnya periode kepemimpinan Saddam Hussein, tentu hal tersebut memunculkan serta membuka lembaran baru dalam dinamika politik, sosial, dan ekonomi di Irak. Lantas, bagaimana akar permasalahan Irak yang berada di bawah kepemimpinan Saddam Hussein, dan bagaimana bisa jatuhnya Saddam Hussein memunculkan perubahan yang signifikan dalam aspek politik, sosial, ekonomi dan keamanan di Irak.

A. Akar Konflik Irak di bawah Rezim Kepemimpinan Saddam Hussein

Irak adalah sebuah negara yang berada di kawasan timur tengah dan merupakan salah satu negara yang disegani terutama pada era kepemimpinan Saddam Hussein. Apabila melihat dari kacamata sejarah, Irak merupakan sebuah negara yang penuh dengan konflik, sebab negara ini terlibat dalam dua perang besar. Perang Saudara dengan Iran misalnya, konflik yang berkepanjangan tersebut terhitung memakan waktu 8 tahun, mulai dari tahun 1980 hingga tahun 1988. Setelah itu perang dengan Kuwait pada tahun 1990, konflik tersebut dilandasi dengan masalah ekonomi yang sedang dirasakan

oleh Irak. Hal tersebut mengacu pada kerugian Irak yang didapat akibat perang berkepanjangan dengan Iran, Irak membutuhkan dana untuk memulihkan kembali infrastruktur serta menutupi kerugian-kerugian akibat perang.²⁶

1. Konflik Dengan Iran

Perang antara Irak dan Iran merupakan sebuah konflik panjang yang hanya melibatkan dua negara yang saling berdekatan. Namun, sebelum membahas lebih lanjut terkait peristiwa perang saudara antara Iran dan Irak. Perlu diketahui terlebih dahulu apa faktor utama yang menyebabkan perang tersebut meletus. Ada beberapa faktor pemicu yang menyebabkan Saddam Hussein mengambil keputusan untuk menyerang Iran.

Adanya perselisihan paham antara Irak dan Iran mengenai perbatasan wilayah, wilayah yang disebut adalah Khuzestan. Khuzestan sendiri merupakan daerah yang kaya akan sumber daya energi, termasuk dengan melimpahnya minyak²⁷. Saddam Hussein melihat adanya sebuah peluang untuk memegang kendali wilayah tersebut untuk memperluas wilayah kekuasaannya. Selain memperluas wilayah, Saddam Hussein juga ingin mendominasi regional dan memiliki pengaruh kuat terhadap dunia arab yang pada saat itu pengaruh dari presiden Mesir “Hosni Mubarak” memiliki sangat kuat terhadap wilayah Arab.

²⁶ Charles J. Shields, *Saddam Hussein Major World Leaders ...*, 57.

²⁷ Ibid, 45.

Saddam Hussein melihat revolusi yang terjadi di Iran pada tahun 1979 yang menyebabkan jatuhnya kekuasaan Shah Pahlevi sebagai presiden Iran. Serta terbentuknya Republik Islam Iran yang dipimpin oleh Ayatollah Khomeini yang seorang Syiah, hal tersebut menjadi sorotan serius bagi Saddam Hussein dikarenakan Saddam Hussein adalah seorang Sunni. Irak sendiri dalam hal ideologi agama, Sunni dan Syiah sama-sama berada di posisi teratas dalam segi kuantitas. Dengan adanya revolusi Iran yang dipimpin oleh Ayatollah Khomeini menyebabkan Saddam Hussein khawatir hal tersebut dapat memberikan pengaruh terhadap kaum Syiah di Irak yang berkemungkinan dapat mengganggu stabilitas kekuasaannya di Irak.

Revolusi yang dilakukan oleh Ayatollah Khomeini di Iran ternyata mendapat sorotan dari pihak internasional, dan pihak internasional juga menganalisis revolusi Iran akan membawa pengaruh yang signifikan terhadap Irak.²⁸ Pihak internasional pada akhirnya melihat Irak sebagai kekuatan sekutu yang mampu menyeimbangkan kekuatan regional Arab. Saddam Hussein pun pada akhirnya mendapat dukungan dari beberapa pihak untuk melakukan serangan ke Iran dengan bantuan persenjataan dan finansial untuk Irak.²⁹ Momen tersebut dirasa sesuai apabila melihat ambisi yang dimiliki Saddam Hussein yang ingin memiliki pengaruh kuat terhadap wilayah Arab. Saddam Hussein sendiri menilai bahwa

²⁸ Con Coughlin, "Saddam His Rise and Fall", (New York : HarperCollins Publishers, 2005), 180.

²⁹ Ibid, 211.

penyerangan ke Iran menjadi sebuah kesempatan untuk mencapai tujuan tersebut serta untuk tetap mengamankan posisinya di Irak.

Perang pun dimulai, pada 22 september 1980 yang pada waktu itu pasukan Irak yang dipimpin oleh Saddam Hussein langsung menyerbu wilayah Khuzestan di Iran. Irak melakukan serangan tersebut bertujuan untuk mengambil kendali atas wilayah yang kaya akan sumber daya tersebut serta mengeksplorasi ketegangan politik internal Iran pasca revolusi. Meskipun terkejut dengan serangan yang diluncurkan oleh Irak, Iran dengan cepat merespon serangan tersebut. Pasukan Iran yang pada saat itu juga dipimpin langsung oleh Ayatollah Khomeini, meluncurkan serangan balik dan berhasil merebut kembali beberapa wilayah Khuzestan yang sempat dikuasai oleh Irak.

Suatu hal yang menyebabkan konflik Irak dan Iran semakin berkepanjangan ialah adanya keikutsertaan pihak asing dalam konflik ini. Terlihat dengan adanya keikutsertaan Amerika Serikat yang memasok persenjataan kimia untuk digunakan oleh Pasukan Irak dan beberapa negara arab yang memberikan pasokan secara materialistik untuk mengakomodasi semua kebutuhan Irak pada kondisi perang.³⁰ Hal tersebut bisa dikatakan adalah sebuah intervensi dari pihak asing yang semakin membuat rancu konflik tersebut.

Setelah aksi saling serang antara pihak Irak dan Iran yang memakan waktu hingga 8 tahun hingga menyebabkan banyaknya korban

³⁰ Charles J. Shields, *Saddam Hussein Major World Leaders ...*, 45.

jiwa serta hancurnya beberapa infrastruktur negara, pada akhirnya konflik tersebut mencapai babak akhir. PBB pada akhirnya turun tangan untuk mengakhiri konflik tersebut dan pada 18 juli 1988 perang berakhir yang menghasilkan sebuah kesepakatan untuk gencatan senjata dari kedua belah pihak³¹. Konflik dari Irak dan Iran tidak merubah apapun termasuk dalam perubahan wilayah, yang dihasilkan hanyalah sebuah kematian, penderitaan dan sebuah dendam. Dampak kerugian tersebut yang akan memicu kondisi instabilitas berkepanjangan bagi dua negara tersebut.

2. Invasi ke Kuwait

Akar permasalahan lain dari Saddam Hussein sebagai Presiden Irak tidak hanya konflik yang ditimbulkan dengan Iran. Setelah ketegangan Irak dan Iran telah memudar walaupun belum sepenuhnya, pada tahun 1990 Saddam Hussein mengambil kebijakan untuk melakukan invasi ke Kuwait.³² Hal yang menjadi alasan dari Saddam Hussein untuk meluncurkan invasi adalah tuduhan Saddam Hussein ke Kuwait yang dianggap melanggar produksi minyak. Kuwait disinyalir melakukan pengeboran ladang minyak di wilayah Irak, dan Irak mengklaim bahwa Kuwait telah mencuri minyak dari daerah perbatasan yang ada di Irak. Saddam Hussein juga mempermasalahkan terkait kedaulatan Kuwait, Saddam beranggapan bahwa Kuwait adalah bagian dari Irak itu sendiri.

³¹ Ibid, 53.

³² Ibid, 15.

Alasan lain dari Saddam Hussein melakukan invasi disebabkan karena pada periode 1990, Irak mengalami krisis ekonomi yang sangat serius karena dampak dari perang berkepanjangan dengan Iran pada tahun 1980-1988. Dengan adanya krisis ekonomi tersebut membuat Saddam Hussein beranggapan bahwa dengan Irak bisa menguasai Kuwait yang dikenal kaya akan sumber daya alam, disinyalir dapat memperbaiki krisis ekonomi yang sedang dialami oleh Irak.

Invasi pun dilakukan oleh Irak yang dipimpin langsung oleh Saddam Hussein pada bulan agustus 1990. Serangan secara tiba-tiba dari pasukan Irak dimulai lewat serangan udara dan darat yang dengan mudah dapat menguasai Kuwait dalam waktu yang singkat. Pendudukan pasukan Irak di Kuwait diawali dengan pengambilan kendali atas berbagai infrastruktur sumber daya alam hingga sistem pemerintahan.³³ Dengan dikuasainya Kuwait, Saddam Hussein secara langsung menganggap bahwasannya Kuwait sebagai provinsi ke 19 dari Irak dan Saddam Hussein juga menunjuk seorang gubernur untuk memerintah wilayah tersebut.

Keputusan Saddam Hussein untuk menginvasi Kuwait merupakan sebuah blunder terbesar yang dilakukan Saddam Hussein, sebab dari kebijakan tersebut menyebabkan stabilitas Irak berubah secara signifikan dikarenakan hal tersebut menjadi perhatian internasional. Dampak dari invasi yang dilakukan Irak, membuat organisasi internasional yaitu PBB mengeluarkan resolusi 660 yang mengutuk invasi Irak ke Kuwait serta

³³ Yussuf Solichien M., Kerjasama PBB-Amerika Serikat dalam ..., th.

mendesak Irak untuk menarik mundur pasukannya dari Kuwait.³⁴ Menurut PBB, apa yang dilakukan Irak telah melanggar hukum internasional, namun Saddam Hussein mengabaikan peringatan tersebut dan tetap keukeh dengan langkah yang sudah diambil, yaitu menginvasi Kuwait.

Setelah tidak mendapat respon dari Saddam Hussein, PBB pun memberlakukan sanksi ekonomi kepada Irak. Sanksi ini meliputi larangan perdagangan minyak Irak dan produk lainnya serta memberikan pembatasan keuangan bagi pemerintahan Irak yang dipimpin oleh Saddam Hussein. PBB pada akhirnya membentuk pasukan koalisi internasional yang dikomandoi oleh Amerika Serikat untuk memberikan respon bagi Irak yang telah melanggar hukum internasional dengan melakukan invasi ke Kuwait. Pada tanggal 29 november 1990, PBB memberikan instruksi kepada negara-negara anggota untuk menggunakan segala cara agar bisa memukul mundur pasukan Irak dari Kuwait apabila Irak tidak menarik diri secara sukarela, peristiwa tersebut dikenal dengan resolusi pembebasan Kuwait.

Hingga kurun waktu 17 januari 1991, pasukan Irak belum menarik diri dari Kuwait. Pada akhirnya koalisi internasional yang dipimpin oleh Amerika Serikat melancarkan serangan operasi militer untuk mengusir pasukan Irak. Operasi ini melibatkan serangkaian serangan udara dan darat yang dalam waktu relatif singkat mampu memukul mundur pasukan Irak

³⁴ Lisa Blaydes, "State Of Iraq Under Saddam Hussein Repression", (United Kingdom : Princenton University Press, 2018), 231.

dan mengakhiri invasi yang dilakukan pasukan Irak di Kuwait. Kerugian yang didapat dari invasi yang dilakukan Irak, berdampak pada sanksi ekonomi yang diberlakukan oleh PBB terhadap Irak. Langkah tersebut berupa pembatasan untuk ekspor minyak, namun PBB masih memiliki rasa kemanusiaan dengan menciptakan program “*Oil for Food*” pada tahun 1995 untuk Irak mengekspor minyak walaupun dengan adanya sanksi pembatasan.³⁵ Hal tersebut merupakan kebijakan dari PBB agar Irak mampu membeli kebutuhan dasar bagi penduduknya. Program tersebut memiliki substansi untuk mengurangi dampak negatif dari sanksi ekonomi.

Seperti tidak ada habisnya kerugian yang dialami oleh Irak pada era kepemimpinan Saddam Hussein terkait langkah yang diambil untuk menginvasi Kuwait. Akibat kekalahan dari pihak koalisi internasional yang dipimpin oleh Amerika Serikat menyebabkan tidak stabilnya kondisi internal Irak. Tidak hanya kondisi internal, akan tetapi Irak juga mendapat tekanan dari pihak eksternal. Hal tersebut disebabkan dengan adanya indikasi bahwasannya Irak memiliki senjata pemusnah massal, hal tersebut dilandasi atas dugaan bahwa Saddam Hussein telah melakukan penyerangan di wilayah selatan dikarenakan tidak kondusifnya kondisi di wilayah tersebut. Penyerangan dilakukan menggunakan senjata pemusnah massal dan penggunaan senjata kimia di kota-kota kurdi seperti Halabja

³⁵ <https://www.un.org/depts/oip/sector-food.html>. (Diakses tanggal 13 Juni 2023 Pukul 06.14 WIB).

pada tahun 1988.³⁶ Rasionalisasi tersebut yang mengakibatkan kekhawatiran dari negara barat dan berasumsi bahwasannya Saddam Hussein telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Kritik dan intervensi untuk proses tindakan lebih lanjut terhadap Irak pun meningkat, terutama dari Amerika Serikat yang berasumsi bahwa Saddam Hussein adalah ancaman bagi stabilitas regional dan kepentingan luar negeri Amerika Serikat.

Posisi Irak semakin terpojok tatkala pada 11 september 2001 telah terjadi serangan teroris di Amerika Serikat. Hal itu menjadi momen titik balik penting dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Pemerintah Amerika Serikat yang pada waktu itu masih di bawah kepemimpinan Presiden George W. Bush menggunakan pendekatan yang lebih keras terhadap negara-negara yang dituding memberikan dukungan terhadap terorisme, termasuk Irak. Timbul sebuah kekhawatiran terkait adanya kemungkinan hubungan antara rezim Saddam Hussein dan kelompok teroris, hal tersebut pada akhirnya memperkuat keputusan George W Bush untuk melakukan invasi ke Irak dan menggulingkan Saddam Hussein.

B. Invasi Amerika Serikat

Pada tanggal 20 Maret 2003, Pasukan Amerika Serikat dan beberapa koalisi internasional yang dipimpin langsung oleh Amerika Serikat melakukan invasi ke Irak. Ada beberapa faktor yang menjadi alasan utama yang mendasari Amerika Serikat dan pasukan koalisi melakukan invasi

³⁶ Lisa Blaydes, *State Of Iraq Under Saddam Hussein ...*, 32.

tersebut. Pertama, adanya dugaan bahwa Saddam Hussein memiliki persediaan senjata pemusnah massal seperti senjata kimia, biologi dan bahkan senjata nuklir. Opini tersebut didapat dari informasi intelijen yang dikumpulkan lalu dianalisis. Kedua, Amerika Serikat mengklaim terkait dugaan adanya hubungan antara rezim Saddam Hussein dan kelompok teroris internasional seperti al-Qaeda. Meskipun tidak adanya bukti konkrit yang menyatakan adanya hubungan Saddam Hussein dengan pelaku penyerangan pada peristiwa 11 September 2001. Pihak AS tetap khawatir dengan adanya dugaan Irak yang memberikan perlindungan dan dukungan terhadap para teroris. Ketiga, menganggap bahwa Rezim Saddam Hussein adalah rezim pemerintahan yang otoriter dan menuding bahwasannya Saddam Hussein adalah seorang pemimpin diktator yang brutal dan melakukan pelanggaran hak asasi manusia.³⁷ Keempat, Amerika Serikat beranggapan bahwa Rezim Saddam Hussein berpotensi menjadi sebuah ancaman bagi keamanan dan stabilitas di kawasan timur tengah. Hal tersebut didasari dengan adanya klaim bahwa Irak memiliki senjata pemusnah massal yang suatu saat akan digunakan Saddam Hussein untuk melancarkan serangan perlawanan ke pihak-pihak yang dianggap merugikan.

Pada tanggal 9 April 2003, Pasukan koalisi yang dipimpin oleh Amerika Serikat mulai menyerbu ibukota Irak yaitu kota Baghdad dan menduduki kota tersebut. Terkait kedatangan Amerika Serikat ke Baghdad

³⁷ Alex Roberto Hybel, "The Bush Administrations and Saddam Hussein", (New York : Palgrave Macmillan, 2006), 120.

menjadi sebuah titik awal dari mulai runtuhnya rezim Saddam Hussein. Hal tersebut dikarenakan banyaknya perwakilan rezim Saddam Hussein yang melarikan diri dan bahkan ada yang menyerah kepada pasukan koalisi.³⁸ Selama invasi berlangsung, pasukan koalisi melancarkan serangkaian operasi militer untuk mengalahkan pasukan Irak serta berupaya untuk mengendalikan wilayah-wilayah yang strategis.

Alhasil pasukan koalisi mampu menguasai sejumlah kota penting seperti Mosul, Basra, dan Tikrit yang merupakan kampung halaman dari Saddam Hussein. Kehadiran pasukan koalisi yang superior memiliki peran penting dalam mengatasi berbagai perlawanan dari pasukan Irak. Namun dalam realitas yang terjadi, pasukan Irak mengalami kesusahan dalam hal membendung serangkaian serangan dari pasukan koalisi, hal tersebut dikarenakan pasukan koalisi yang memiliki persenjataan lengkap serta adanya kekuatan udara yang dominan.

1. Tertangkapnya Saddam Hussein

Setelah runtuhnya rezim Saddam Hussein, banyak pejabat pemerintah yang pro dengan Saddam Hussein menyelamatkan diri dan bersembunyi dari pasukan koalisi. Hal tersebut membuat Amerika Serikat melakukan pencarian yang intensif untuk menemukan dan menangkap mereka yang pro dengan Saddam Hussein. Berbagai upaya dilakukan oleh Amerika Serikat untuk mengumpulkan para intelijen untuk menemukan Saddam Hussein yang bersembunyi. Dalam hal ini melibatkan

³⁸ Charles J. Shields, *Saddam Hussein Major ...*, 127-128.

pengintaian, penyusupan, interogasi terhadap tahanan serta menjalin kerja sama dengan beberapa pihak yang memiliki informasi terkait keberadaan Saddam Hussein.

Setelah berbulan-bulan bersembunyi, Saddam Hussein akhirnya tertangkap pada tanggal 13 desember 2003. Penangkapan Saddam Hussein dilakukan di desa Ad-Dawr yang berada di Tikrit Irak yang merupakan kampung halaman dari Saddam Hussein. Saddam Hussein ditemukan bersembunyi di dalam sebuah gubuk yang berada di Desa Ad-Dawr. Saddam Hussein diketahui melakukan penyamaran untuk menghindari upaya penangkapan dari pihak koalisi selama berbulan-bulan.

Namun, setelah melalui tahapan-tahapan investigasi dan pengintaian yang sangat intens, pasukan koalisi yang dipimpin Amerika Serikat mampu melacak keberadaan Saddam Hussein serta menangkapnya.³⁹ Pasca operasi penangkapan selesai, berita tersebut langsung diumumkan kepada dunia lewat pernyataan resmi dari Amerika Serikat. Pernyataan tersebut langsung menyebar hingga menjadi sorotan internasional. Atas upaya yang telah dilakukan oleh pihak koalisi, keberhasilan tersebut dianggap sebagai pencapaian besar dan merupakan titik balik dari upaya untuk mengakhiri rezim Saddam Hussein.

Setelah ditangkap pada tanggal 13 Desember 2003, Saddam Hussein ditahan oleh Amerika Serikat. Pada awalnya Saddam Hussein ditahan di penjara *Camp Cropper*, yang terletak di sekitaran bandara

³⁹ Ibid, 134-135.

internasional Baghdad.⁴⁰ *Camp Cropper* sendiri merupakan sebuah penjara yang didesain khusus untuk penjahat kelas kakap, hal tersebut berlaku untuk Saddam Hussein. Penjara tersebut memiliki sebuah fasilitas keamanan yang super ketat dengan tingkat pengawasan tinggi. Hal tersebut merupakan upaya atau tindakan pencegahan apabila ada tahanan yang lari atau terdapat serangan dari luar penjara. Pada awal tahun 2004, Saddam Hussein mengalami pemindahan tempat tahanan. Saddam Hussein dipindahkan di area kompleks markas besar pasukan Amerika Serikat yang dikenal dengan sebutan *Camp Victory* atau tempat kemenangan. Area kompleks tersebut berada tidak jauh dari tempat Saddam Hussein ditahan sebelumnya, yaitu masih di daerah dekat bandara internasional Baghdad. Tempat tersebut menjadi pusat komando dan kendali bagi pasukan koalisi, maka dari itu Saddam Hussein dipindahkan agar mendapat pengawasan yang jauh lebih ketat daripada tempat sebelumnya.

2. Persidangan dan Hukuman untuk Saddam Hussein

Dinamika dari problematika Saddam Hussein pada akhirnya memasuki fase persidangan. Persidangan Saddam Hussein sendiri merupakan salah satu momen penting dalam sejarah hukum yang ada di Irak. Persidangan pertama dimulai pada tanggal 19 oktober 2005 di Baghdad, Irak. Saddam Hussein menjadi terdakwa dalam sidang tersebut, Saddam Hussein juga didampingi oleh beberapa pengacara yang dipilih

⁴⁰ Con Coughlin, *Saddam His Rise and Fall ...*, 377.

olehnya. Persidangan dilakukan di hadapan sejumlah hakim yang diberi tugas oleh pemerintah Irak, yang baru dibentuk setelah jatuhnya rezim Saddam Hussein.⁴¹

Persidangan tersebut berlangsung cukup lama dan hal tersebut menjadi sorotan dunia internasional. Tujuan dari persidangan tersebut adalah untuk mengungkap kebenaran di balik tuduhan-tuduhan kejahatan yang dituduhkan kepada Saddam Hussein. Selama persidangan berlangsung, beberapa tuduhan sudah diajukan kepada Saddam Hussein. Diantara tuduhan tersebut mencakup perihal pembantaian yang dilakukan oleh Saddam Hussein terhadap etnis kurdi di Halabja pada tahun 1988, penumpasan pemberontakan syiah di wilayah selatan Irak pasca perang teluk pada tahun 1991, dan adanya dugaan keterlibatan Saddam Hussein dalam pembantaian 140 warga lebih di desa Dujail pada tahun 1982.⁴²

Beberapa bukti pun diajukan dalam persidangan tersebut, mulai dari dokumen, kesaksian para saksi hingga bukti forensik. Kesaksian dari beberapa korban hingga mantan anggota rezim Saddam Hussein telah menjadi bagian penting dalam upaya mengungkap kebenaran terhadap berbagai tuduhan yang dilayangkan. Namun, persidangan atas terdakwa Saddam Hussein tidaklah berjalan mulus, seringkali adanya kontroversi. Beberapa kali terjadi insiden di ruang sidang, termasuk adanya adu mulut antara Saddam Hussein dan hakim. Terdapat berbagai retorika yang terjadi

⁴¹ Ibid, 378.

⁴² Charles J. Shields, *Saddam Hussein Major ...*, 49.

di setiap proses persidangan Saddam Hussein, mulai dari reshuffle pada pimpinan sidang yang memimpin jalannya persidangan Saddam Hussein, dan terdapat suatu momen saat Saddam Hussein tertawa ketika akan divonis mati oleh pengadilan khusus Irak. Namun, momen tertawa Saddam Hussein saat akan divonis ternyata hanya sebuah propaganda semata yang dibuat-buat oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Terdapat sebuah momen saat ketua hakim memvonis Saddam Hussein dengan hukuman gantung, Saddam Hussein dengan berapi-api mengeluarkan argumen terhadap ketua hakim yang dinilai menjadi bagian dari Amerika Serikat untuk menggulingkan dia sebagai presiden Irak. Tetapi apapun yang dikatakan oleh Saddam Hussein tidak membuat keadaan berubah, sebab apa yang sudah ditetapkan oleh pengadilan dinilai sudah bulat dan bersifat mutlak.

Pada tanggal tanggal 5 november 2006, persidangan Saddam Hussein pun telah memasuki babak akhir ketika Saddam Hussein dan dua rekannya yaitu Barzan Ibrahim dan Awad Hamed al-Bandar dinyatakan bersalah atas dugaan kasus pembantaian warga di desa Dujail pada tahun 1982. Pembantaian tersebut diduga balasan terhadap adanya upaya pembunuhan terhadap Saddam Hussein. Vonis tersebut dikeluarkan oleh Mahkamah Khusus Irak, pengadilan tersebut berdiri khusus untuk mengadili mantan rezim Saddam Hussein, dan dari pengadilan tersebut telah menghasilkan tiga terdakwa yang dinyatakan bersalah atas tindak

kejahatan kemanusiaan dan dijatuhi hukuman mati dengan cara digantung.⁴³

Terkait adanya dugaan pembantaian yang dilakukan oleh rezim Saddam Hussein terhadap warga di Dujail, dilandasi dengan adanya serangan yang diluncurkan oleh kelompok pemberontak di desa tersebut pada tahun 1982. Saat itu bertepatan dengan adanya agenda dari Saddam Hussein untuk menghadiri acara politik. Setelah adanya serangan, pasukan keamanan Saddam Hussein pun pada akhirnya merespon balik serangan tersebut.⁴⁴ Dalam persidangan, para saksi menyampaikan kesaksian mereka terkait tindakan represif pasukan keamanan Saddam Hussein pada saat itu. Bukti seperti dokumen, laporan forensik dan adanya kesaksian dari korban telah memperkuat dakwaan terhadap Saddam Hussein.

Pada akhirnya, Saddam Hussein pun harus rela dan ikhlas menghadapi takdirnya. Pelaksanaan hukuman gantung sendiri telah ditetapkan akan dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2006, tempat eksekusi pun akan diselenggarakan di sebuah fasilitas militer yang ada di luar Baghdad. Hukuman gantung yang didapat oleh Saddam Hussein telah menjadi sebuah peristiwa atau titik awal dari fase baru bagi perkembangan negara Irak, yang tidak banyak orang tahu atau menduga terkait, apakah Irak akan jauh lebih baik tanpa Saddam Hussein, atau malah sebaliknya.

⁴³ Negar Azimi, "On Democracy By Saddam Hussein", (New York : Deste Foundation, 2012), 113.

⁴⁴ Con Coughlin, *Saddam His Rise and Fall ...*, 193.

C. Kondisi Irak pasca Invasi

Pasca invasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat yang berakibat jatuhnya rezim Saddam Hussein, telah memberikan dampak yang berkepanjangan dan kompleks bagi Irak. Meskipun pada awalnya tujuan dari invasi adalah untuk menggulingkan Saddam Hussein dari kursi kepemimpinan Irak dan ingin merekonstruksi demokrasi. Namun, realita yang terjadi justru memberikan konsekuensi yang rumit dan bercabang, hal tersebut meliputi dari terjadinya perpecahan sosial, instabilitas politik, kerusakan ekonomi, peningkatan terorisme dan adanya ketegangan regional. Dampak tersebut masih terasa di Irak dan upaya dalam pemulihan Irak menjadi sebuah pekerjaan yang rumit dan kompleks bagi negara tersebut serta bagi komunitas internasional.

1. Kondisi Politik Pasca Invasi

Pasca jatuhnya Saddam Hussein, Irak menghadapi berbagai sejumlah tantangan dalam aspek politik, dampak yang terjadi juga berimbas pada kondisi politik awal Irak setelah penggulingan Saddam Hussein ditandai oleh ketidakstabilan dan konflik, sebab penggulingan Saddam Hussein menghasilkan kekosongan kekuasaan dan munculnya berbagai kelompok yang menginginkan kursi kekuasaan yang kosong tersebut. Banyak kelompok bersaing demi mendapatkan kekuasaan dan memiliki pengaruh.⁴⁵ Dampak dari kekosongan kekuasaan tersebut

⁴⁵ Syed Rifaat Hussain, "Current Developments in Iraq and Future Dispensation, *Policy Perspective*, Vol.7 No 1 (Juni, 2010), 19.

berimbang dengan munculnya persaingan politik yang intens antara berbagai faksi, kelompok dan etnis di Irak. Hal tersebut mengakibatkan dan meningkatkan intensitas konflik antara Sunni dan Syiah di Irak yang menyebabkan kondisi instabilitas di Irak.

Dengan adanya kondisi politik yang tidak stabil di Irak akibat adanya kekosongan kekuasaan yang mengakibatkan konflik untuk memperebutkan kekuasaan yang pada saat itu sedang kosong. Dilandasi dengan lemahnya institusi politik di Irak, sebab dengan jatuhnya Saddam Hussein membuat adanya rekonstruksi dan perubahan dalam tata kelola negara yang menciptakan sebuah kekosongan administratif dan lemahnya kapasitas pemerintahan. Hal ini dapat menciptakan sebuah rasa ketidakpuasan dan protes dari rakyat Irak. Banyak yang merasa kecewa dengan kondisi instabilitas politik yang ada di Irak dan menuntut adanya sebuah perubahan.

Setelah berbagai kekacauan melanda Irak, pada akhirnya Amerika Serikat selaku pelaku utama dalam invasi tersebut, membentuk sebuah lembaga yang bernama *Coalition Provisional Authority* (CPA) atau dewan administrasi koalisi, yang bertujuan untuk mengatur dan memulihkan tata kelola Irak agar stabil, aman dan demokratis terutama pasca jatuhnya rezim Saddam Hussein. CPA sendiri dibentuk pada bulan april 2003 yang dipimpin oleh Paul Bremer seorang diplomat dari Amerika Serikat.⁴⁶

⁴⁶ Con Coughlin, *Saddam His Rise and Fall ...*, 359.

CPA ikut andil dalam rekonstruksi institusi politik yang ada di Irak, mereka juga memberikan dukungan penuh untuk proses pembentukan pemerintahan yang inklusif dan representatif serta memberikan fasilitas penunjang untuk proses pembentukan badan legislatif yang baru. Sepanjang masa transisi yang dipimpin oleh CPA, mereka memulai proses pengalihan kekuasaan kepada pemerintahan Irak yang berdaulat. Pada 28 juni 2004, CPA memberikan hak kekuasaan kepada pemerintahan transisi Irak yang baru dibentuk, yaitu dewan administrasi Irak (*Iraq Governing Council*).⁴⁷

Dewan administrasi Irak merupakan sebuah badan pemerintahan yang dibentuk oleh CPA yang memiliki tupoksi sebagai pemerintahan di masa transisi yang mengatur Irak sampai masa transisi selesai dan persiapan peralihan ke pemerintahan Irak yang berdaulat. Anggota dari dewan administrasi Irak sendiri terdiri dari 25 orang yang diambil dari berbagai perwakilan kelompok etnis agama dan suku yang ada di Irak. Dewan administrasi Irak memiliki kekuasaan legislatif dan eksekutif yang memiliki tanggung jawab dalam sebuah pengambilan keputusan penting seperti pembentukan undang-undang, pembangunan infrastruktur dan pembentukan institusi pemerintahan yang baru.

Setelah masalah institusi telah diatasi oleh CPA yang kemudian dilimpahkan ke dewan administrasi Irak, pada akhirnya dewan

⁴⁷ Ibid, 368.

administrasi Irak mencapai masa akhir keaktifan.⁴⁸ Pada dasarnya mereka dibentuk hanya karena adanya kekosongan kekuasaan yang ada di Irak yang menyebabkan tidak stabilnya kondisi Irak. Pada tahun 2005, pemerintah sementara Irak mengadakan pemilihan umum, hal ini disebut sebagai langkah awal dalam proses demokratisasi Irak. Pemilihan ini menghasilkan pembentukan parlemen baru dan terpilihnya perdana menteri, namun proses politik tersebut diwarnai dengan adanya persaingan dan ketegangan kembali antara Syiah, Sunni dan yang seringkali menimbulkan ketegangan dan kekerasan.

Pada akhirnya, tercipta sebuah pemerintahan baru di Irak yang diharapkan mampu lebih inklusif dan mewakili berbagai kelompok-kelompok etnis dan sektarian, sebab pada rezim pemerintahan Saddam Hussein, etnis syiah tampak seperti etnis yang terpinggirkan dan nampak ada ketimpangan kursi kedudukan di pemerintahan. Sunni sangat mendominasi dalam posisi pemerintahan dan syiah yang dianak tirikan. Itulah yang menjadi salah satu faktor munculnya perang Irak dan Iran dikarenakan etnis syiah yang terpinggirkan di Irak. Hal tersebut menjadi sebuah perhatian khusus bagi pemerintahan baru Irak agar lebih objektif dan tidak pandang bulu dalam menetapkan orang-orang di dalam kursi pemerintahan negara. Namun, upaya untuk membangun konsensus politik masih mendapatkan tantangan, dikarenakan masih adanya perselisihan

⁴⁸ Ibid, 362.

politik yang terjadi, korupsi merajalela, dan kurangnya kepercayaan publik terhadap pemerintahan yang baru.

Dalam perkara institusi, Irak masih mengalami perubahan, sebab pada saat jatuhnya rezim era kepemimpinan Saddam Hussein, institusi politik mengalami kekacauan. Proses rekonstruksi dan pembangunan kembali institusi menjadi salah satu hal yang penting untuk memperbaiki bidang pelayanan publik, mengembalikan keamanan dan memperkuat kapasitas pemerintah. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah baru Irak dalam merekonstruksi berbagai aspek-aspek politik yang ada di Irak. Terdapat suatu hal yang membuat pemerintah baru Irak mengalami tekanan luar dan dalam negeri, sebab ada keterlibatan pihak luar yang memiliki dampak signifikan terhadap kondisi politik Irak pasca Saddam Hussein.

Amerika Serikat contohnya, Amerika Serikat memiliki peran penting dalam dinamika politik yang terjadi di Irak, sebab hal tersebut sudah menjadi kebijakan politik luar negeri Amerika untuk menstabilkan kondisi politik yang ada di Irak, dari berbagai problematika yang terjadi, mulai dari tidak stabilnya kondisi politik Irak, serta campur tangan dari pihak asing telah mempengaruhi dinamika politik yang terjadi di Irak.⁴⁹

Beberapa negara-negara serta kekuatan dalam lingkup regional di Timur tengah memiliki kepentingan dalam keikutsertaannya dalam

⁴⁹ Anthony H. Cordesman, "Putting American and Iraqi Failures in Perspective, *Giving Iraq Stability and Progress*, (Maret, 2023), 3.

dinamika politik di Irak. Tujuan utamanya adalah untuk menjaga stabilitas regional serta berupaya memiliki akses terhadap sumber daya energi. Seperti Iran dan Arab Saudi, kedua negara tersebut memiliki kepentingan untuk mempengaruhi arah politik Irak agar memperoleh keuntungan regional dan kekuasaan. Serta mengupayakan perluasan pengaruh mereka dan mendukung kelompok politik atau etnis tertentu di Irak yang memiliki kepentingan yang sama dengan kepentingan mereka. Irak memang selalu seksi dimata dunia, terdapat banyak kepentingan serta keinginan untuk mempromosikan nilai serta ideologi dari golongan-golongan yang mencari keuntungan.

2. Kondisi Sosial dan Keamanan Pasca Invasi

Pasca digulingkannya Saddam Hussein, hal tersebut berdampak pada kondisi Sosial yang terjadi di Irak. Terjadinya perubahan sosial yang signifikan, yang mempengaruhi tatanan sosial di masyarakat Irak. Salah satu dampak sosial yang paling menonjol adalah adanya ketegangan dan meningkatnya konflik sektarian di Irak yang melibatkan syiah dan sunni. Konflik tersebut menyebabkan saling balas dalam hal penyerangan yang berdampak negatif pada kehidupan sosial di masyarakat Irak.⁵⁰ Selain dari adanya konflik, dampak dari invasi juga membuat kekacauan sosial dan hilangnya kontrol keamanan yang berdampak dengan meluasnya kekacauan di segala penjuru Irak. Kekacauan tersebut menyebabkan hancurnya infrastruktur mulai dari rumah sakit, sekolah dan beberapa

⁵⁰ Syed Rifaat Hussain, *Current Developments in Iraq ...*, 20.

fasilitas umum lainnya. Hal tersebut sangat mempengaruhi kondisi sosial Irak, sebab dengan hancurnya beberapa infrastruktur dapat menyebabkan adanya stagnasi dalam hal kesehatan, pendidikan dan kualitas hidup masyarakat Irak.

Selama periode pasca invasi, masyarakat Irak harus menghadapi berbagai tantangan baru dalam dinamika sosial di Irak. Seperti meningkatnya kasus kejahatan, adanya tindak korupsi dari para pejabat dan ketidakstabilan keamanan. Banyak juga masyarakat Irak yang menghadapi himpitan ekonomi dikarenakan tidak adanya kepastian dalam hal pekerjaan akibat rusaknya infrastruktur apalagi dengan kondisi instabilitas politik di Irak. Dengan berbagai dinamika sosial yang terjadi, tidak sedikit pula mengakibatkan banyak rakyat Irak yang memilih mengungsi dikarenakan adanya rentetan problematika yang sedang menjadi makanan sehari-hari Irak.

Jutaan orang terpaksa meninggalkan Irak agar bisa mendapatkan sebuah tempat perlindungan yang lebih aman dari beberapa negara tetangga. Dengan adanya kasus warga Irak yang mengungsi dengan intensitas yang massif, menyebabkan adanya perubahan demografi yang sangat signifikan hingga menyebabkan adanya perubahan komposisi sosial di Irak.⁵¹ Perubahan demografi yang terjadi di Irak berdampak luas terhadap komposisi sosial masyarakat dan kondisi budaya di Irak. Hal

⁵¹ <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-65200593> (Diakses pada tanggal 15 Juni 2023 Pukul 05.30 WIB).

tersebut mencakup dengan perubahan dalam struktur kependudukan, komposisi etnis dan pola pemukiman, Tentu yang melandasi adanya perubahan tersebut adalah dinamika politik yang terjadi di Irak yang memberikan dampak signifikan bagi kondisi sosial di Irak.

Berbagai konflik dan kekerasan yang ada di Irak berdampak serius dengan kondisi psikologis masyarakat Irak. Hal tersebut disebabkan banyak dari berbagai individu dan masyarakat mengalami kehilangan atas orang-orang terdekat mereka akibat konflik yang sedang terjadi. Dengan kehilangan anggota keluarga, kerabat serta teman menyebabkan adanya trauma emosional yang sangat mendalam, bukan hanya itu, keterlibatan langsung masyarakat Irak dalam rentetan konflik juga menyebabkan hal yang sama dalam perkara trauma emosional yang mempengaruhi fungsi sosial, interaksi sosial, serta kesejahteraan dalam sosial bermasyarakat.

Dampak lain dari instabilitas sosial yang ada di Irak, merembet dengan adanya kerugian dalam sektor pelayanan pendidikan dan kesehatan. Hal tersebut menghambat proses pendidikan dan pelayanan kesehatan di Irak.⁵² Banyak anak-anak yang harus rela kehilangan sekolah dikarenakan fasilitas pendidikan yang hancur akibat invasi dan konflik internal, dan kondisi kesehatan yang memprihatinkan akibat keterbatasan fasilitas kesehatan.

Akibat serangkaian konflik yang terjadi, berdampak besar kepada Irak yang mengalami perpecahan sosial, sebab konflik politik dan

⁵² Ibid.

kepentingan telah membuat adanya klasifikasi masyarakat Irak ke dalam berbagai kelompok-kelompok, etnis, dan sektarian yang terbelenggu. Hal ini mengakibatkan hilangnya rasa saling percaya dan tingkat solidaritas antar kelompok pun memudar, serta berdampak pada semakin sulitnya untuk melakukan proses rekonsiliasi dan rekonstruksi sosial.

Namun terdapat perubahan dalam struktur sosial dan perubahan gender serta peran perempuan akibat penggulingan Saddam Hussein. Peristiwa tersebut mampu merubah struktur sosial di Irak. Beberapa kelompok yang dahulunya adalah kelompok yang terpinggirkan, seperti syiah dan kurdi, kini dua kelompok tersebut mulai dilirik dan memiliki pengaruh yang lebih besar. Hal ini merupakan sejarah dan dinamika baru dalam hubungan sosial di Irak dan mempengaruhi hirarki sosial di Irak. Lalu perubahan sosial juga berdampak pada gender hingga peran perempuan dalam masyarakat Irak, sebab kini perempuan memperoleh kesempatan yang lebih untuk terjun secara leluasa dalam perkara dinamika politik, ekonomi dan sosial.⁵³ Namun hal tersebut merupakan langkah awal bagi mereka para aktivis kesetaraan gender, untuk mewujudkan keinginan dalam hal kesetaraan dan memerangi yang namanya kekerasan terhadap perempuan.

Dari berbagai dinamika sosial yang terjadi pasca digulingkannya Saddam Hussein, menjadi sebuah pekerjaan rumah yang tidak bisa

⁵³ Hafiza Aryaputri, "Invasi Pasukan Koalisi: Kebangkitan atau Keterpurukan Kehidupan Sosial-Politik Perempuan Irak, *Kajian timur tengah*, Vol. 7, No. 1, (Juni 2015), 157.

disepelekan oleh pemerintah Irak. Hal tersebut dikarenakan pemerintah Irak harus melakukan rekonsiliasi dan reintegrasi untuk masyarakat Irak yang terpecah, dan membangun ulang kepercayaan, hubungan harmonis antar kelompok-kelompok yang ada di Irak. Namun hal tersebut bukanlah hal yang mudah dan memerlukan upaya jangka panjang serta perlu adanya kolaborasi antara pemerintah, pemimpin masyarakat dan aktor sosial demi terwujudnya stabilitas jangka panjang dalam aspek sosial di Irak.

Pasca invasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat, kondisi keamanan Irak mengalami dinamika yang kompleks dan bergejolak. Jatuhnya Saddam Hussein berdampak pada kondisi keamanan Irak yang pada saat itu berubah secara drastis. Pasca invasi, Irak mengalami peningkatan dalam aktivitas militer dan konflik antar berbagai kelompok yang ada di Irak.⁵⁴ Ketidakstabilan keamanan tersebut berdampak secara kompleks yang mencakup pada serangan teroris, perang saudara, hingga konflik antara kelompok-kelompok etnis dan sektarian.

Pasukan koalisi yang dipimpin oleh Amerika Serikat memiliki upaya dalam memulihkan kondisi keamanan dengan melakukan operasi militer dan membentuk pasukan keamanan Irak yang baru. Hal tersebut mengerucut pada terciptanya pasukan tentara Irak dan kepolisian Irak yang baru yang bertanggung jawab atas stabilitas negara Irak. Pasukan koalisi memberikan bantuan dengan adanya pelatihan keamanan. Dengan terbentuknya pihak keamanan yang baru, hal tersebut dilakukan untuk

⁵⁴ Ibid, 155.

menggantikan peran dari pasukan koalisi yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Namun, berbagai upaya telah dilakukan oleh otoritas Irak untuk menjaga kondusifitas keamanan negara, namun ternyata masih terdapat banyak problem yang harus diatasi. Seperti konflik sektarian yang masih berkeajolok pada waktu itu yang bakal mempengaruhi stabilitas negara.

Upaya rekonsiliasi antar etnis terus dilakukan oleh otoritas pemerintah Irak, guna membangun keamanan yang berkelanjutan. Proses dialog yang berguna untuk perdamaian serta adanya inklusi politik diharapkan mampu mengurangi intensitas ketegangan serta memperkuat kerjasama antar etnis yang ada di Irak. Berbagai rintangan Kondisi keamanan Irak pasca digulingkannya Saddam Hussein sangat tidak stabil. Hal tersebut adalah imbas dari kekacauan dari kondisi sosial, politik dan ekonomi yang ada di Irak. Kerusuhan serta kematian terjadi di seluruh penjuru Irak, yang dimulai dari kekosongan kekuasaan Irak yang ditinggalkan oleh Saddam Hussein yang berakibat hilangnya kontrol terhadap kelompok-kelompok bersenjata yang bersaing untuk memperebutkan kursi kekosongan kekuasaan. Salah satu perkara yang mempengaruhi stabilitas keamanan di Irak adalah munculnya konflik etnis dan sektarian antara syiah, sunni dan kurdi yang menyebabkan serangkaian kekerasan, pembunuhan, serangan dari kelompok separatis dan perang saudara di segala penjuru Irak.

Adanya keikutsertaan pihak asing seperti Amerika Serikat yang juga memberi faktor bagi kondisi keamanan di Irak. Dalam invasi serta

pendudukannya di Irak sangat mempengaruhi stabilitas negara Irak, dikarenakan banyak pihak yang mempertanyakan legalitas serta dasar hukum keberadaan Amerika Serikat di Irak, serta adanya tuduhan yang mengatakan bahwasannya telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap tawanan perang.

Kontroversi lain pun muncul terkait dugaan bahwa kehadiran atau pendudukan Amerika Serikat di Irak ada unsur kepentingan ekonomi dan sumber daya, terlebih lagi Irak memiliki sumber daya energi minyak. Asumsi ini menggambarkan terkait keberadaan Amerika Serikat sebagai bentuk upaya untuk memegang kendali terhadap sumber daya energi Irak.⁵⁵ Hal tersebut tentu menjadi sebuah kontroversi dan perdebatan tentang dampak dan efektivitas kehadiran Amerika Serikat dalam mempertahankan kedudukan di Irak.

3. Kondisi Ekonomi Pasca Invasi

Kekacauan dan ketidakstabilan Irak pasca lengsernya Saddam Hussein juga berpengaruh dalam aspek ekonomi. Menjadi sebuah hal yang normal apabila suatu negara mengalami baru saja mengalami invasi, itu juga yang dialami oleh Irak pasca digulingkannya Saddam Hussein. Kondisi ekonomi awal Irak setelah digulingkannya Saddam Hussein diidentifikasi oleh kerusakan infrastruktur, menurunnya produksi minyak,

⁵⁵ Syed Rifaat Hussain, *Current Developments in Iraq ...*, 17.

dan ketidakstabilan keuangan serta adanya tantangan dalam merekonstruksi ulang sektor ekonomi yang inklusif.⁵⁶

Kerusakan infrastruktur dimulai sejak invasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat pada tahun 2003, banyak infrastruktur ekonomi di Irak yang mengalami kerusakan yang parah. Jalanan, jembatan, serta fasilitas umum lainnya rusak dan hancur akibat serangan militer dan serangkaian konflik pasca invasi. Hal inilah yang menyebabkan aktivitas pembangunan ekonomi di Irak mengalami hambatan dan sulit untuk memulihkan kembali. Serangkaian konflik yang terjadi pasca invasi juga memiliki andil besar atas kerugian ekonomi Irak. Dampak yang dihasilkan ialah merugikan sektor perdagangan, industri, dan pariwisata yang secara terpaksa harus diberhentikan segala bentuk operasional akibat ketidakstabilan politik dan keamanan di Irak.

Sektor produksi minyak juga terkena dampak, perlu diketahui bahwasannya Irak merupakan salah satu penghasil minyak terbesar di dunia. Namun, pasca peristiwa invasi Amerika Serikat, produksi minyak mengalami penurunan yang cukup signifikan, hal tersebut berdampak negatif bagi pendapatan negara dan perekonomian bagi Irak secara keseluruhan.

Tidak hanya itu, Irak juga mengalami krisis ekonomi perihal keuangan, bagaimana tidak mengalami krisis. Apabila di kondisi sulit dan masa transisi pasca peristiwa jatuhnya Saddam Hussein, pengelolaan

⁵⁶ Ibid, 18.

keuangan negara mengalami penyalahgunaan dana, korupsi, hingga tidak ada transparansi dalam keluar masuknya uang, hal itu menjadi masalah serius bagi Irak yang pada saat itu sedang atau baru saja mengalami problem yang sangat serius. Selain itu, tingkat pengangguran di Irak mengalami peningkatan yang sangat massif. Konflik dan hancurnya sektor ekonomi Irak yang menjadi alasan terjadinya banyak perusahaan tutup yang mengharuskan adanya pemotongan pegawai. Terdapat banyak juga lapangan pekerjaan yang harus gulung tikar akibat kerusakan infrastruktur dan menyusutnya aktivitas ekonomi di Irak.

Hal tersebut pada akhirnya menyebabkan penurunan standar hidup masyarakat Irak. Banyak warga yang harus menghadapi fase kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, air bersih, tempat tinggal dan layanan kesehatan.⁵⁷ Tidak stabilnya ekonomi di Irak dan tingkat pengangguran sangat tinggi menyebabkan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi meningkat sangat drastis. Dengan berbagai macam dampak kerugian pasca invasi, Irak mendapatkan bantuan internasional dan upaya investasi untuk memulihkan ekonomi Irak pasca Saddam Hussein. Berbagai bentuk bantuan serta investasi muncul dari berbagai lapisan. Seperti Amerika Serikat, Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF), beberapa negara anggota koalisi (Inggris, Australia, Polandia), dan beberapa lembaga internasional lainnya.⁵⁸

⁵⁷ Seth Jones, "Securing Health: Lessons from Nation-Building Missions", (RAND Corporation, 2006), 238.

⁵⁸ Shamiran Mako, "Evaluating the Pitfalls of External Statebuilding in Post-2003 Iraq (2003-2021)", *Intervention and Statebuilding*, (2021), 428.

Bentuk bantuan yang diberikan seperti mendirikan program-program pembangunan infrastruktur, rekonstruksi dan pembangunan institusi. Amerika juga membantu dalam pemulihan sektor minyak, pertanian, pendidikan dan kesehatan.⁵⁹ Bantuan dan investasi tersebut juga bertujuan untuk membantu Irak merekonstruksi infrastruktur, mengembangkan sektor ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan. Dengan adanya bantuan dari beberapa pihak internasional menyebabkan Irak meletakkan harapan penuh kepada bantuan internasional.

Efek dari ketergantungan tersebut dapat menghasilkan adanya sebuah keterlibatan pihak eksternal terhadap masa transisi pembangunan ekonomi Irak. Meskipun mendapat bantuan internasional untuk pemulihan kondisi pasca invasi dan konflik, Irak juga harus memiliki upaya sendiri untuk membangun kualitas internal yang solid untuk mengurangi kadar ketergantungan dari pihak asing.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁵⁹ Anthony H. Cordesman, *Putting American and Iraqi ...*, 3.

BAB III

Perkembangan Irak Pasca Era Kepemimpinan Saddam Hussein

Bab ini menjelaskan kondisi perkembangan Irak pasca dihukumnya Saddam Hussein. Perkembangan Irak pasca era Saddam Hussein telah melalui berbagai rintangan dari berbagai aspek kehidupan seperti aspek politik, sosial, ekonomi dan keamanan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwasannya kesulitan, hambatan serta adanya tantangan akan selalu berjalan beriringan dan menjadi bagian bagi sebuah negara yang mengalami masa transisi akibat konflik yang terjadi, hal tersebut juga dialami oleh Irak pasca era kepemimpinan Saddam Hussein. Lantas perkembangan dan perubahan seperti apa yang sudah terjadi di Irak pasca era kepemimpinan Saddam Hussein, dan bagaimana dinamika yang terjadi dalam aspek sosial, politik, ekonomi dan keamanan pada era kepemimpinan presiden-presiden pasca Saddam Hussein.

A. Ghazi Al-Yawer (2004-2005)

Ghazi al-Yawer merupakan presiden sementara Irak yang menjabat pada masa transisi Irak pasca invasi dari Amerika Serikat yang menggulingkan rezim Saddam Hussein. Dengan adanya hal tersebut tentu menjadi tugas besar bagi Ghazi al-Yawer sebagai presiden sementara Irak untuk menstabilkan berbagai sektor yang terkena dampak dari invasi seperti sektor politik, sosial, keamanan dan ekonomi. Disamping itu juga terdapat berbagai isu-isu yang menjadi polemik pada era transisi Irak yang dipimpin oleh Ghazi al-Yawer.

1. Konsolidasi Politik dan Rekonsiliasi Nasional

Dinamika politik Irak pasca digulingkannya Saddam Hussein diawali dengan pengambilalihan sistem pemerintahan dari Amerika Serikat. Hal tersebut disebabkan terjadinya kekosongan kekuasaan di Irak yang menyebabkan kekacauan dimana-mana. Dengan adanya kekosongan kekuasaan menyebabkan tidak adanya korporasi yang bisa mengendalikan situasi dari berbagai aspek kehidupan yang ada di Irak. Amerika Serikat selaku dalang dari jatuhnya rezim Saddam Hussein menciptakan pemerintahan sementara dalam masa transisi Irak yang dipimpin oleh seorang politisi Sunni yang bernama Ghazi Al-Yawer.⁶⁰ Dengan adanya pemerintahan sementara Irak, semakin menambah bumbu dalam dinamika politik Irak yang pada saat itu sedang mengalami kekacauan pasca invasi.

Pada era kepemimpinan sementara Ghazi Al-Yawer, yang menjabat sebagai presiden pada tahun 2004-2005. Irak pada saat itu masih mengalami kondisi instabilitas politik. Pada era pemerintahan sementara Ghazi Al-Yawer memiliki tujuan untuk menstabilkan serta mempersiapkan peralihan pemerintahan Irak secara permanen. Ghazi al-Yawer bekerja sama dengan otoritas koalisi internasional untuk bersama-sama memperbaiki Irak yang pada saat itu masih dalam masa transisi.

Selama masa transisi tersebut, berbagai upaya dalam penyusunan konstitusi baru bagi Irak terus dilakukan. Namun berbagai tantangan serta

⁶⁰ Nora Bensahel, "Governances and Political Reconstruction, *Prewar Planning and the Occupation of Iraq*, (2008), 175.

hambatan masih menyelimuti Irak, sebab adanya ketegangan sektarian masih membuat kondisi Irak tidak stabil. Ghazi al-Yawer selaku pimpinan negara sementara Irak, mengakomodasi upaya untuk rekonsiliasi dengan berdialog dan bernegosiasi antara kelompok-kelompok yang bersitegang. Upaya tersebut diharapkan menjadi titik awal untuk mengurangi ketegangan antara pihak-pihak politik dan sektarian.

Ditengah dinamika politik Irak pada masa transisi Ghazi al-Yawer, Irak masih terdapat campur tangan dari pihak eksternal. Amerika Serikat masih memiliki sebuah pengaruh dalam dinamika politik Irak yang ditandai dengan adanya dukungan berbentuk menjaga keamanan Irak pada masa transisi.⁶¹ Dikarenakan pada masa transisi masih dipenuhi ketegangan antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam menguasai Irak. Walaupun telah ada upaya rekonsiliasi dari pihak pemerintah, tidak membuat Amerika begitu saja meninggalkan atau menghiraukan Irak. Amerika Serikat tetap memonitor Irak dengan memberikan bantuan keamanan.

Pada masa kepemimpinan sementara Ghazi al-Yawer, yang menjadi momen penting dalam masa transisi adalah adanya pemilihan umum pada tahun 2005.⁶² Pemilihan umum tersebut memiliki tujuan untuk membangun pemerintahan secara permanen yang mewakili berbagai kelompok yang ada di Irak. Pada momen penting tersebut adalah langkah awal dalam membangun fondasi demokrasi dan stabilitas politik pasca Saddam Hussein digulingkan.

⁶¹ Ibid, 178.

⁶² Kenneth Kazman, "Iraq: Politics, Governance, and Human Right, (2014), 2.

Dapat dikatakan momen tersebut merupakan momen historis bagi rakyat Irak agar dapat berpartisipasi dalam proses politik untuk menentukan siapa pemimpin mereka selanjutnya.

Pada pemilu tahun 2005, rakyat Irak memilih anggota majelis nasional Irak. Majelis nasional Irak sendiri merupakan lembaga legislatif yang memiliki tanggung jawab dalam proses penyusunan konstitusi baru di Irak dan membentuk struktur pemerintahan baru. Proses pemilihan umum tersebut melibatkan berbagai kelompok di Irak agar ikut berpartisipasi, hal tersebut merupakan sebuah langkah agar terciptanya semangat inklusivitas dalam dinamika politik.⁶³

Pemilihan umum pun menghasilkan seorang politikus kurdi bernama Jalal Talabani yang merupakan pendiri dari partai Uni Patriotik Kurdistan. Selain itu, pemilihan umum juga menghasilkan terbentuknya pemerintahan baru yang mewakili berbagai kelompok etnis di Irak yang merupakan bagian dari upaya kesepakatan politik dan rekonsiliasi nasional demi menjaga stabilitas Irak.⁶⁴

Dengan telah terpilihnya Jalal Talabani sebagai presiden Irak, membuat tugas dari Ghazi al-Yawer sebagai presiden sementara Irak berakhir.⁶⁵ Ghazi sendiri telah menjalankan tugas penting dalam menjaga stabilitas Irak dalam masa transisi serta menjadi fasilitator dalam langkah awal proses demokratisasi Irak. Pemilihan umum sendiri merupakan awal

⁶³ Ibid, 3.

⁶⁴ Ibid, 3.

⁶⁵ Ibid, 4.

dalam perjalanan Irak menuju stabilitas politik serta pemulihan kembali pasca jatuhnya Saddam Hussein.

2. Penanganan Konflik Sektarian dan Tantangan Keamanan

Kondisi sosial dan keamanan pada era presiden sementara Ghazi al-Yawer dapat dikatakan masih cukup rumit dan dipenuhi dengan rintangan. Masih bisa dikatakan wajar, sebab pada saat Ghazi al-Yawer memimpin kondisi Irak pada saat itu masih mengalami masa transisi akibat invasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat untuk menggulingkan rezim Saddam Hussein. Masalah utama yang harus diatasi oleh Ghazi al-Yawer tidak lain dan tidak bukan adalah konflik internal yang terjadi di Irak yang mencakup beberapa kelompok seperti Sunni, syiah dan kurdi. Ketegangan antara kelompok tersebut benar-benar mempengaruhi stabilitas sosial dan mengancam keamanan Irak.⁶⁶ Ketegangan tersebut dikhawatirkan dapat memicu kekerasan dan menciptakan bibit-bibit konflik di berbagai wilayah di Irak.

Pada era Ghazi al-Yawer, Irak dapat dianalogikan menjadi panggung dari serangkaian serangan aksi kelompok-kelompok bersenjata. Serangan bom dan pengeboman berupa mobil dan serangan terhadap lembaga pemerintahan telah menjadi suatu hal yang lumrah pada saat itu.⁶⁷ Tentu hal tersebut menjadi sebuah ancaman serta sesuatu yang tidak menyenangkan bagi rakyat Irak. Setelah invasi Amerika Serikat dan telah tertangkapnya

⁶⁶ Anthony H. Cordesman, "Giving Iraq Stability and Progress", *Putting American and Iraqi Failures in Perspective*, (2023), 2.

⁶⁷ http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/3720161.stm (Diakses pada tanggal 22 juni 2023 pukul 21.59 WIB).

Saddam Hussein yang mereka kira konflik sudah mereda, ternyata tidak. Hal tersebut membuat pihak keamanan Irak melakukan serangkaian upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Selama periode tersebut pihak keamanan Irak dibuat sibuk dengan adanya pertempuran melawan pihak kelompok militan yaitu Al-Qaeda Iraq (AQI) yang dipimpin oleh Abu Musab al-Zarqawi yang menyebabkan kekacauan di segala penjuru Iraq.⁶⁸ Dengan kekacauan dan instabilitas sosial yang sedang terjadi di Irak, mengakibatkan banyak warga Irak yang memilih meninggalkan rumah mereka dan mencari tempat untuk mengungsi. Setidaknya mereka berada di daerah yang jauh dari konflik sehingga tetap membuat mereka aman.⁶⁹ Dengan adanya situasi tersebut memberikan dampak yang kompleks pada kondisi sosial Irak, hal tersebut menyebabkan adanya perpecahan dan banyak juga individu yang harus kehilangan rumah mereka.

Kondisi tersebut membuat Ghazi al-Yawer harus memberikan bantuan keamanan bagi mereka-mereka yang terkena dampak. Namun dengan permasalahan yang sangat kompleks tersebut membuat upaya tersebut sedikit mengalami hambatan. Dengan demikian, langkah yang diambil oleh pemerintah sementara yaitu melakukan rekonsiliasi. Meskipun berada di tengah ketegangan sosial dan keamanan, upaya dialog dan negosiasi tetap dilakukan meskipun sangat beresiko.⁷⁰ Upaya tersebut diharapkan mampu

⁶⁸ Ibid.

⁶⁹ <https://www.hrw.org/report/2006/11/27/silent-treatment/fleeing-iraq-surviving-jordan> (Diakses pada Tanggal 23 Juni Pukul 03.25 WIB).

⁷⁰ Kenneth Kazman, *Iraq: Politics ...*, 4.

sedikit meredakan ketegangan yang terjadi antar kelompok. Dengan segala problematika yang terjadi, proses rekonsiliasi tetap berupaya menghasilkan perdamaian dalam masyarakat Irak meskipun upaya tersebut memerlukan waktu yang lama apabila ingin hal tersebut berjalan maksimal.

3. Pemulihan Ekonomi dan Rekonstruksi Infrastruktur

Pada era Ghazi al-Yawer, kondisi ekonomi Irak dapat dikatakan masih belum stabil. Hal tersebut dikarenakan Ghazi al-Yawer hanya menjadi pimpinan sementara Irak sampai masa transisi berakhir. Kondisi ekonomi pada era Ghazi al-Yawer ditandai dengan hancurnya berbagai infrastruktur di Irak, yang menyebabkan terhambatnya produksi minyak yang telah menjadi pemasok utama dalam ekonomi Irak. Akibat dari tidak kondusifnya keamanan serta politik di Irak menyebabkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi Irak.

Namun terdapat berbagai upaya yang dilakukan oleh Ghazi al-Yawer untuk menstabilkan segala aspek kehidupan yang ada di Irak terutama aspek ekonomi. Langkah yang dilakukan Ghazi al-Yawer sebenarnya baik, namun tidak baik untuk sektor ekonomi di Irak kedepannya. Ghazi al-Yawer mengharapkan bantuan dari berbagai sektor internasional untuk membangun ulang ekonomi Irak pasca invasi.⁷¹ Pemulihan produksi minyak juga dilakukan dengan skala yang besar dan hal tersebut terjalin sebuah kerjasama dengan pihak minyak asing untuk membantu meningkatkan teknologi minyak di Irak. Dengan upaya pemulihan yang dilakukan oleh Ghazi al-Yawer,

⁷¹ Shamiran Mako, *Evaluating the Pitfalls ...*, 426.

terbesar dipikirkannya untuk merekonstruksi ulang infrastruktur di Irak yang hancur akibat invasi. Hal tersebut dilakukan untuk menopang keberlangsungan perkembangan ekonomi Irak agar tumbuh secara maksimal dan mampu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Irak.

B. Jalal Talabani (2005-2014)

Pada era Jalal Talabani, Irak dapat dikatakan masih dalam tahap pemulihan atau belum benar-benar stabil. Perselisihan politik masih menjadi suatu problem yang mengakar pada ketidakstabilan berbagai sektor kehidupan yang ada di Irak. Terlebih berbagai persoalan yang muncul kepermukaan telah menjadi sebuah tantangan dan juga bisa dikatakan hambatan bagi perkembangan negara Irak menuju negara yang aman dan stabil.

1. Konsolidasi Politik dan Proses Demokrasi

Setelah Jalal Talabani terpilih menjadi Presiden Irak, bukan berarti segala problematika Irak hilang begitu saja. Memang, dengan terpilihnya Jalal Talabani merupakan sebuah harapan baru bagi stabilitas negara Irak pasca invasi dari Amerika Serikat. Namun tidak dapat dipungkiri bahwasannya masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan oleh Jalal Talabani. Salah satu fokus utama dari pemerintahan baru Irak yang dipimpin oleh Jalal Talabani adalah menuntaskan rekonsiliasi nasional antara beberapa kelompok di Irak.

Upaya tersebut dilakukan sama seperti saat era transisi kepemimpinan Ghazi al-Yawer, yaitu untuk meminimalisir ketegangan politik, menjadi fasilitator dialog serta mengatasi segala perselisihan yang ada. Tujuan dari

upaya yang dilakukan tersebut demi terwujudnya kerangka politik yang inklusif dan memastikan semua kelompok dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.

Pemerintahan era Jalal Talabani juga berupaya membangun sistem politik yang bersifat demokratis melalui konstitusi yang disusun pasca pemilihan umum tahun 2005.⁷² Perkara tersebut bermaksud untuk adanya implementasi konstitusi yang bersifat untuk memperkuat institusi demokrasi seperti Majelis perwakilan dan Mahkamah Konstitusi.

Pada tahun 2010, Jalal Talabani kembali terpilih sebagai presiden Irak, hal ini cukup mengherankan serta membuat bingung para orang awam, sebab dalam revisi konstitusi pada tahun 2005 yang mengatakan terkait masa jabatan presiden dalam 1 periode hanya selama 4 tahun. Namun hal tersebut dikecualikan pada masa akhir jabatan Jalal Talabani, hal tersebut dikarenakan pada tahun 2010 terdapat ketegangan politik di Irak yang menyebabkan pemilihan umum harus ditunda.⁷³ Dengan tidak stabilnya kondisi tersebut menyebabkan Irak mengalami masa transisi kembali dan dipimpin oleh Jalal Talabani hingga 2014. Hal tersebut mengacu dengan konstitusi Irak perihal masa jabatan presiden yang dapat diperpanjang apabila kondisi tidak kondusif atau tidak adanya kesepakatan politik yang ada di beberapa faksi.

Jalal Talabani kembali memimpin Irak untuk menstabilkan kondisi politik Irak. Namun, pada tahun 2012, Jalal Talabani mengalami masalah

⁷² Kenneth Kazman, *Iraq: Politics ...*, 3.

⁷³ *Ibid*, 8.

pada kesehatannya yang mengharuskan ia mendapat perawatan intensif ke Jerman.⁷⁴ Meskipun pada tahun 2013 Jalal Talabani telah pulih walaupun tidak sepenuhnya, kesehatannya terus menurun yang berdampak pada produktivitas dia dalam menjalankan berbagai tugas presidensial. Dengan kondisi Jalal Talabani yang semakin memburuk, pada tahun 2014 Jalal Talabani resmi mengundurkan diri sebagai presiden.

Setelah mundurnya Jalal Talabani dari kursi kepresidenan Irak, situasi politik Irak semakin tidak stabil ditandai dengan adanya perselisihan politik yang mengakibatkan adanya perubahan dalam mekanisme pemilihan presiden yang baru. Pada akhirnya pemilihan presiden Irak dilakukan melalui mekanisme parlementer atau berdasarkan voting dari majelis perwakilan Irak. Proses pemilihan presiden pun melibatkan adanya kesepakatan politik dari berbagai partai hingga faksi-faksi politik di Irak, dengan adanya persoalan tersebut terjadi sebuah perselisihan dan perundingan antara berbagai kelompok terkait calon presiden yang disepakati.⁷⁵

Setelah melewati proses perundingan yang cukup kompleks, muncul kandidat yang bernama Fuad Masum yang mendapat dukungan dari sejumlah partai politik seperti Uni Patriotik Kurdistan dan beberapa partai syiah lainnya. Majelis Perwakilan Irak pun mengadakan voting untuk memilih

⁷⁴ Ibid, 15.

⁷⁵ Ibid, 21.

presiden dan menghasilkan Fuad Masum sebagai presiden Irak yang terpilih secara parlementer dengan suara mayoritas.⁷⁶

2. Rekonsiliasi Sosial dan Tantangan Keamanan

Kondisi sosial dan keamanan Irak pada era Jalal Talabani juga cukup kompleks. Hal ini ditandai dengan adanya upaya pemulihan dan rekonstruksi infrastruktur sosial yang mengalami kehancuran akibat konflik dan kekerasan yang terjadi di Irak selama bertahun-tahun. Fokus utama dari hal tersebut ialah memperbaiki layanan bidang pendidikan, kesehatan dan beberapa infrastruktur publik untuk kembali menghidupi kebutuhan dasar rakyat Irak.⁷⁷

Setelah adanya perang dan konflik, hal tersebut berdampak pada pergeseran sosial di Irak. Perubahan demografi, migrasi dan adanya perubahan komposisi populasi di Irak telah mempengaruhi struktur sosial dan pola kehidupan. Seperti halnya pemimpin sebelumnya, Jalal Talabani juga mengupayakan rekonsiliasi dan perdamaian nasional untuk terwujudnya perdamaian antar kelompok yang bersitegang. Hal tersebut terus diupayakan untuk membangun ruang harmonisasi di antara masyarakat Irak.

Kemudian dalam sektor keamanan Irak pada era Jalal Talabani mengalami serangkaian problematika yang cukup rumit. Dikarenakan pada era tersebut, Irak melakukan perlawanan terhadap kelompok ekstremis seperti ISIS. Dengan dihadapi persoalan seperti itu, pada akhirnya Irak mendapat bantuan dan dukungan dari koalisi internasional untuk meluncurkan serangan

⁷⁶ <https://wayback.archive-it.org/all/20171010063651/http://www.iraqsun.com/news/224095839/moderate-kurd-leader-elected-as-iraq-president> (Diakses pada tanggal 23 Juni 2023 Pukul 12.56 WIB).

⁷⁷ Seth Jones, *Securing Health: Lessons from Nation ...*, 238.

untuk melawan kelompok ekstremis tersebut serta memulihkan keamanan di wilayah yang terkena dampak.

Konfrontasi yang diakibatkan dari kelompok ekstremis, membuat Irak melakukan upaya peningkatan kerjasama dengan beberapa negara dan lembaga internasional untuk mendapatkan dukungan dalam memerangi tindak kekerasan dari pasukan ekstremis, meningkatkan kualitas keamanan dan mempromosikan stabilitas regional.

3. Transformasi Ekonomi

Pada era presiden Jalal Talabani, sama seperti era sebelumnya bahwa Irak tetap mengalami serangkaian hambatan pada perkembangan ekonomi. Hal tersebut disebabkan konflik yang terus terjadi, instabilitas pada politik dan inkonsisten harga minyak menjadi sebuah tantangan bagi pemerintah era Jalal Talabani. Dalam produksi minyak, Irak tentu menjadi produsen minyak terbesar di dunia, pada era Jalal Talabani terdapat upaya untuk meningkatkan produksi minyak serta memaksimalkan pendapatan dari minyak tersebut. Program untuk meningkatkan lapangan produksi minyak baru dan pembaharuan infrastruktur dilakukan untuk meningkatkan kapasitas produksi.⁷⁸

Jalal Talabani juga menerapkan beberapa kebijakan perubahan dalam sektor ekonomi. Hal demikian dilakukan bertujuan untuk mengatasi hambatan dalam struktural dan meningkatkan lingkungan investasi di Irak. Perubahan tersebut ditandai dengan adanya upaya untuk diversifikasi

⁷⁸ Kenneth Kazman, *Iraq: Politics ...*, 25.

ekonomi, hal tersebut dilakukan untuk mengurangi kadar ketergantungan Irak pada sektor minyak. Pada akhirnya adanya perubahan titik fokus pun diarahkan pada sektor non minyak seperti pertanian, industri, pariwisata dan jasa keuangan.⁷⁹ Perubahan tersebut dikembangkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan bagi setiap individu di Irak dan juga tak lupa untuk mengikis kesenjangan ekonomi yang terjadi. Namun, hal tersebut masih diupayakan oleh Jalal Talabani, sebab semua bisa berubah apabila konflik dan kekerasan masih merajalela di Irak.

Pembangunan beberapa infrastruktur yang rusak akibat rentetan konflik yang ada di Irak juga terus diupayakan oleh pemerintahan Jalal Talabani. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan dasar yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi di Irak. Dengan adanya upaya untuk membangkitkan sektor ekonomi di Irak, pemerintah berusaha mendorong investasi asing untuk mau berinvestasi di Irak dan memberikan jaminan perlindungan hukum bagi para investor. Kontrak produksi minyak dan program kemitraan publik maupun swasta dilakukan untuk memfasilitasi investasi dalam berbagai sektor ekonomi.

C. Fuad Masum (2014-2018)

Fuad Masum adalah presiden Irak pada periode 2014-2018, Irak pada era tersebut juga tidak dapat dikatakan sudah stabil, akan tetapi semakin tidak stabil.

⁷⁹ <https://www.ispionline.it/en/publication/how-iraq-can-move-beyond-oil-sector-32014> (Diakses pada 24 Juni 2023 Pukul 22.00 WIB).

Dengan kemunculan kelompok ekstremis ISIS semakin memberikan pengaruh yang signifikan bagi perkembangan Irak di berbagai sektor.

1. Dinamika Politik Irak

Fuad Masum terpilih menjadi Presiden Irak pada 24 juli 2014 M melalui mekanisme parlementer.⁸⁰ Pada era kepemimpinan Fuad Masum, terjadi beragam dinamika dalam aspek politik Irak. Seperti adanya perundingan politik antara berbagai partai politik dan faksi-faksi di Irak yang menyebabkan situasi ketegangan antara beberapa pihak yang menyebabkan terjadinya perselisihan politik. Hal tersebut dilandasi dengan saling berlomba-lombanya beberapa partai dan faksi politik di Irak untuk dapat memiliki kekuasaan di Irak.

Perselisihan politik ini mencakup perihal distribusi kekayaan, kebijakan nasional dan pertentangan mengenai ideologi.⁸¹ Dinamika politik yang massif seperti ini sangat mempengaruhi stabilitas politik dan juga menghambat proses dalam mengambil keputusan. Hal tersebut menjadi perhatian khusus bagi Fuad Masum sebagai presiden Irak, dikarenakan dia sebagai presiden harus mampu menjaga stabilitas politik dan memfasilitasi proses-proses politik yang terjadi di Irak.

Dengan adanya perselisihan politik yang menyangkut beberapa partai politik tersebut. Upaya untuk meredakan ketegangan yang terjadi, pada akhirnya ada sebuah pembentukan pemerintahan koalisi yang mencakup

⁸⁰<https://wayback.archive-it.org/all/20171010063651/http://www.iraqsun.com/news/224095839/moderate-kurd-leader-elected-as-iraq-president> (Diakses pada 23 Juni 2023 Pukul 12.56 WIB).

⁸¹ Shamiran Mako, *Evaluating the Pitfalls ...*, 429.

berbagai partai dan fraksi yang mengalami ketegangan tersebut. Negosiasi hingga kesepakatan politik pun terjadi lagi, negosiasi mencakup berbagai hal penting seperti adanya pembagian jatah kekuasaan, mendapat posisi menteri dan berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan. Setelah proses negosiasi menemui kesepakatan, pada akhirnya terbentuklah pemerintahan koalisi. Tujuan dari terbentuknya pemerintahan koalisi adalah untuk menciptakan stabilitas politik di Irak serta memastikan berbagai kelompok politik di Irak dapat berpartisipasi hingga mengatasi perselisihan politik demi persatuan nasional Irak.

Terlepas dari berbagai dinamika yang terjadi di dalam politik Irak, terdapat problematika lain yang dihadapi Fuad Masum sebagai presiden Irak. Tantangan lain yang dihadapi adalah, munculnya kelompok militansi ISIS di era kepemimpinannya. Tentu hal tersebut merupakan suatu problematika yang harus diselesaikan Fuad Masum.

2. Perbaikan Aspek Sosial dan Tantangan Keamanan dari ISIS

Selama era Presiden Fuad Masum, kondisi sosial dan keamanan Irak masih mengalami serangkaian konflik. Termasuk dengan konflik yang masih hinggap antara kelompok etnis yang ada di Irak. Berbagai upaya pun kembali dilakukan oleh pemerintah Irak pada era Fuad Masum. Lagi-lagi pemerintah memfasilitasi dialog antar kelompok yang selalu terlibat konflik di Irak dengan adanya penekanan pemahaman untuk saling memahami dan mengurangi intensitas ketegangan dan mencari kesepakatan bersama.⁸²

⁸² Ibid., 435

Setelah itu proses rekonsiliasi menggunakan cara mediasi untuk menuturkan rasa membangun kepercayaan antar sesama untuk mengurangi ketegangan.

Ditengah perundungan konflik yang terjadi, Fuad Masum juga berkomitmen untuk melindungi hak asasi manusia bagi setiap warga di Irak tanpa memandang status sosial. Melalui kebijakan tersebut pemerintah memastikan adanya kesetaraan hak dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan yang stabil dan adil bagi segala pihak.⁸³ Fuad Masum juga melihat akan pentingnya pendidikan dan promosi toleransi antar sesama demi membangun masyarakat yang harmonis. Hal tersebut dilakukan dengan cara memasukkan pendidikan tentang keragaman etnis dan agama yang ada di dalam kurikulum setiap sekolah.

Afirmasi agar semakin kuatnya upaya dalam membangun lingkungan yang harmonis antar kelompok di Irak. Fuad Masum melakukan upaya untuk melibatkan perwakilan dari setiap kelompok untuk ikut andil dalam proses pengambilan keputusan politik. Dengan pemberian ruang partisipasi dari mereka, pemerintah berharap hal tersebut dapat memperkuat hubungan antar kelompok yang dapat memberikan pengaruh dalam pembangunan negara.

Namun, Fuad Masum juga masih menghadapi tantangan yang signifikan dalam aspek sosial. Permasalahan pengungsi yang masih menjadi sebuah persoalan yang harus diatasi, banyaknya warga Irak yang melarikan diri dari Irak disebabkan kondisi ketidakstabilan Irak.⁸⁴ Warga Irak banyak

⁸³ Kenneth Kazman, *Iraq: Politics ...*, 26.

⁸⁴ Seth Jones, *Securing Health: Lessons from Nation ...*, 256.

yang melarikan diri ke negara-negara tetangga seperti Turki, Lebanon dan Yordania. Hal tersebut membuat Fuad Masum berupaya untuk menjalin sebuah kerjasama dengan negara-negara yang menjadi tujuan dari warga Irak untuk mengungsi agar mencari solusi yang konkrit untuk memberikan bantuan perlindungan kepada pengungsi. Tidak hanya mengungsi keluar Irak, masih terdapat juga penduduk Irak yang mengungsi di wilayah sekitar Irak.⁸⁵ Beberapa dari mereka mengungsi di daerah yang relatif masih aman dari yang namanya konflik. Fuad Masum pun berjanji akan memberikan bantuan serta perlindungan untuk para penduduk Irak yang mengungsi, bantuan tersebut meliputi pendidikan, kesehatan serta konsumsi.

Disisi lain, Fuad Masum harus juga menghadapi berbagai ancaman yang mengganggu stabilitas keamanan Irak. ISIS yang pada saat itu mulai aktif memberikan serangan dan teror kepada Irak.⁸⁶ Pasukan Irak yang pada saat itu mendapat dukungan penuh dari koalisi internasional yang dipimpin Amerika Serikat pun melancarkan operasi militer untuk memerangi ISIS. Operasi militer pun melibatkan polisi dan pasukan keamanan lainnya secara aktif dalam operasi tersebut yang bertujuan untuk memulihkan kondisi keamanan serta menjaga stabilitas wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh ISIS. Berbagai upaya dilakukan untuk memperkuat sistem keamanan untuk mengamankan perbatasan adanya patroli keamanan secara intensif untuk menjaga stabilitas keamanan Irak.

⁸⁵ Ibid., 256.

⁸⁶ Aida Arosoaie, "Iraq", *Counter Terrorist Trends and Analyses*, Vol. 8 No. 1 (Desember 2015), 93.

3. Transformasi Ekonomi Irak

Secara keseluruhan, perkembangan ekonomi Irak pada era Fuad Masum tidak jauh berbeda seperti apa yang diupayakan oleh presiden sebelumnya yaitu Jalal Talabani, berbagai upaya terus dilakukan oleh Fuad Masum untuk memperbaiki sektor ekonomi di Irak. Mulai dari peningkatan sektor minyak, diversifikasi ekonomi, rekonstruksi infrastruktur, pengembangan sektor non minyak dan promosi bagi investasi asing sudah dilakukan. Secara substansi memang sama seperti upaya yang dilakukan presiden sebelumnya, dan hambatannya pun sama, yaitu konflik dan politik yang menyebabkan hambatan-hambatan itu terjadi.

Namun, pada periode Fuad Masum yang menjadi hambatan serius adalah keberadaan kelompok ekstremis yang memberikan dampak negatif bagi perkembangan ekonomi Irak. Setelah pasukan Irak yang berada di bawah kendali Fuad Masum berhasil mengalahkan ISIS walaupun tidak secara keseluruhan, akan tetapi kondisi pasca konflik dengan ISIS memberikan dampak kerusakan infrastruktur terhadap wilayah-wilayah di Irak.⁸⁷ Perkara tersebut yang pada akhirnya membuat kondisi ekonomi Irak harus mengalami ketidakstabilan akibat konflik dengan ISIS.

Perkara tersebut pada akhirnya membuat fokus terhadap produksi minyak mengalami intensitas yang tinggi hingga menyebabkan ketergantungan kembali ekonomi Irak pada sektor minyak.⁸⁸ Tentu bukan hal

⁸⁷ <https://www.nytimes.com/2017/11/12/world/middleeast/iraq-kurds-autonomous-borders.html>
(Diakses pada 24 Juni 2023 Pukul 21.00 WIB).

⁸⁸ <https://www.ispionline.it/en/publication/how-iraq-can-move-beyond-oil-sector-32014>
(Diakses pada 24 Juni 2023 Pukul 22.00 WIB).

yang etis apabila suatu negara hanya berfokus pada satu sektor ekonomi yang berasal dari sumber daya alam, sebab hal tersebut membuat fokus terhadap sektor ekonomi lainnya menjadi mangkrak.

D. Barham Salih (2018-2022)

Pada Era Barham Salih, Irak dapat dikatakan sedang mengalami fase pemulihan akibat konflik dengan ISIS sebelumnya, konflik dengan ISIS menghambat segala upaya perbaikan untuk segala lini yang ada di Irak dan bahkan akan terus berkelanjutan. Tentu pekerjaan rumah yang sangat besar harus dihadapi Barham Salih sebagai presiden. Berbagai dinamika pun harus dihadapi demi terwujudnya negara Irak yang lebih baik lagi.

1. Rekonstruksi Politik

Barham Salih merupakan Presiden Irak yang menggantikan presiden sebelumnya yaitu Fuad Masum. Proses terpilihnya Barham Salih pun tidak jauh berbeda seperti proses terpilihnya Fuad Masum, yaitu dengan mekanisme pemilihan voting dari anggota parlemen. Barham Salih terpilih pada 2 oktober 2018, ia diusung langsung oleh partai demokratik kurdi dan partai gerakan untuk perubahan.⁸⁹ Kedua partai tersebut merupakan basis partai di wilayah kurdistan Irak.

Dengan terpilihnya Barham Salih merupakan sebuah tanda adanya kesepakatan politik antara beberapa partai politik di Irak serta menggambarkan adanya upaya untuk menjaga stabilitas kekuasaan serta

⁸⁹ <https://worldleaders.columbia.edu/directory/dr-barham-salih> (Diakses pada 25 Juni 2023 Pukul 04.49 WIB).

manifestasi yang inklusif dalam kepemimpinan negara. Namun, tantangan yang dihadapi oleh Barham Salih tidak jauh berbeda seperti para pendahulunya, ketegangan antar etnis masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan.⁹⁰ Intensitas ketegangan sedikit surut ketika ada sebuah kontestasi politik dan beberapa dari mereka sudah ada kesepakatan politik.

Selama era kepemimpinan Barham Salih, diwarnai dengan adanya perselisihan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terutama kurdi.⁹¹ Cukup mengherankan, sebab Barham Salih merupakan orang kurdi. Tidak hanya itu, yang menjadi sebab adanya perselisihan adalah tidak adanya kesepakatan politik dalam hal kekayaan sumber daya alam dan otonomi regional. Hal ini masih menjadi problem serta warisan konflik yang masih belum terselesaikan dan program rekonsiliasi yang diupayakan oleh pemerintah sebelum-sebelumnya juga belum maksimal. Dengan semakin melebarnya perselisihan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pada akhirnya ada upaya kedua belah pihak untuk melebur yaitu dari pemerintah pusat dan daerah, meskipun entah peleburan ini sifatnya hanya sebatas momen atau peleburan secara menyeluruh.⁹²

Berbagai perundingan serta upaya rekonsiliasi terus dilakukan, negosiasi politik juga dijalankan agar tercapainya sebuah kesepakatan yang dapat memenuhi aspirasi hingga kepentingan dari kedua belah pihak. Dari

⁹⁰ Kenneth Kazman, *Iraq: Politics ...*, 18.

⁹¹ Yasir Kuoti, "After the Kurdistan Referendum: Iraq's Road to Reconciliation," *MERI Policy Brief*, Vol. 4 No. 13 (Oktober 2017), 1.

⁹² *Ibid.*, 3.

upaya tersebut diharapkan dapat mengurangi ketegangan dan mencapai kompromi yang saling menguntungkan kedua belah pihak.

Pada era kepemimpinannya Barham Salih juga terdapat upaya untuk memberantas korupsi yang merajalela pada masa jabatannya.⁹³ Berbagai cara dilakukan pemerintah Barham Salih untuk memberantas korupsi, mulai dari meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efisiensi dalam administrasi publik. Hal tersebut dilakukan oleh Barham Salih dikarenakan apabila korupsi masih merajalela, ditakutkan akan menciptakan benih perselisihan dalam konteks politik, oleh karena itu selain untuk menyehatkan keuangan. Barham juga berupaya menjaga setiap lini yang dapat menciptakan ketegangan antar kelompok.

Barham Salih juga harus menyelesaikan warisan yang ditinggalkan oleh pemerintahan sebelumnya, yaitu menumpas kelompok militan ISIS. Kelompok ini masih melakukan ekspansi wilayah yang bukan hanya di Irak akan tetapi juga di Suriah. Hal tersebut adalah upaya dari ISIS untuk mendeklarasikan pendirian negara Islam. Atas ancaman serta keonaran yang dilakukan oleh ISIS membuat Barham Salih sebagai presiden Irak melakukan kerjasama pihak koalisi internasional yang dipimpin oleh Amerika Serikat.⁹⁴ Dengan adanya kerjasama tersebut melibatkan adanya bentuk dukungan mulai dari militer, intelijen untuk memerangi kelompok ekstrimis tersebut.

⁹³ <https://www.voaindonesia.com/a/irak-hadapi-pertempuran-nasional-melawan-korupsi/6243715.html> (Diakses 25 Juni 2023 Pukul 06.00 WIB).

⁹⁴ Anthony H. Cordesman, *Giving Iraq Stability ...*, 9.

2. Transformasi Sosial dan Tantangan Keamanan

Perkembangan sosial dan keamanan era Barham Salih tidak terlalu ada perubahan yang signifikan, atau masih melanjutkan upaya-upaya perbaikan dari pemerintah yang sebelumnya. Pada dasarnya kondisi sosial dan keamanan Irak akan selalu seperti ini, sebab adanya pihak luar yang masih berkekuatan dan ikut campur dengan internal Irak. Sementara itu ambisi dari masing-masing kelompok juga masih menjadi sebuah problematika yang mempengaruhi kondisi sosial di Irak. Dalam hal pengungsi juga masih menjadi sebuah persoalan yang belum teratasi dari pemerintahan yang sebelumnya, tentu hal ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi Irak era Barham Salih sebab warisan-warisan yang ditinggalkan oleh para pendahulunya terhitung sangat kompleks.

Dalam sektor keamanan, era Barham Salih juga mengalami dinamika yang kompleks. Memang, pada era sebelumnya keamanan sempat stabil dengan kalahnya ISIS oleh pasukan Irak. Namun, kekalahan tersebut tidak lantas membuat ISIS kalah secara keseluruhan, masih terdapat sisa-sisa kekuatan ISIS untuk melakukan serangan yang dapat mengakibatkan kondisi instabilitas bagi Irak. Dengan adanya kondisi yang tidak stabil di Irak seperti kondisi politik dan sosial yang diakibatkan konflik etnis yang tak kunjung berakhir serta adanya perselisihan politik. Hal tersebut dapat menjadi celah serta pintu masuk bagi ISIS untuk merekrut anggota lagi.

3. Pemulihan Ekonomi

Pada era Barham Salih, perkembangan ekonomi Irak mengalami sedikit perubahan daripada presiden sebelumnya. Tatkala presiden sebelumnya selalu meninggalkan warisan konflik yang memperburuk situasi ekonomi di Irak dan terlalu bergantung pada minyak walaupun telah melakukan upaya diversifikasi ekonomi, pada era Barham Salih upaya diversifikasi ekonomi benar-benar dilakukan seperti penekanan terhadap sektor pertanian, industri, pariwisata dan teknologi.⁹⁵ Barham menilai bahwa sektor-sektor tersebut memiliki potensi besar untuk mengembangkan sektor ekonomi Irak yang pada saat itu masih bergantung pada minyak.

Upaya dari diversifikasi ekonomi tersebut merupakan fokus utama dari Barham Salih untuk mendorong para investor asing maupun lokal dengan menyediakan jaminan hukum bagi para investor serta memperbaiki iklim bisnis dan regulasi yang ada. Selain itu, kerja sama dengan lembaga-lembaga keuangan internasional dan beberapa mitra ekonomi juga menjadi bagian penting dalam strategi upaya pembangunan ekonomi Irak.⁹⁶ Langkah tersebut yang menjadi perbedaan dari presiden sebelumnya yang dirasa tidak terlalu menekankan diversifikasi ekonomi Irak.

Pemulihan Infrastruktur di Irak juga menjadi salah satu prioritas utama yang dibenahi oleh Barham Salih. Hal tersebut ditandai dengan upaya pemerintah melakukan pembangunan serta pengembangan rumah sakit,

⁹⁵ Dlawer Ala'Aldeen, "Reconstructing Iraq: Where Do We Stand?", *Policy Brief*, Vol. 4, No. 29 (Maret, 2019), 2.

⁹⁶ *Ibid*, 1.

layanan pendidikan, rumah, jalan dan beberapa infrastruktur layanan lainnya yang dianggap memiliki potensi dalam menyediakan lapangan pekerjaan.⁹⁷ Meskipun demikian dengan adanya upaya perbaikan, tidak bisa dipungkiri Irak masih menghadapi berbagai tantangan dan hambatan ekonomi seperti adanya penurunan harga minyak, ketidakstabilan politik dan banyaknya infrastruktur yang rusak dan ketidakpastian keamanan di Irak masih menjadi sebuah tantangan yang harus dihadapi Irak untuk memperbaiki sektor ekonomi.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁹⁷ Ibid, 2.

BAB IV

Posisi Geopolitik Irak di Timur Tengah pasca era Saddam Hussein

Pasca digulingkannya Saddam Hussein dari kursi kepemimpinan Irak, Irak telah mengalami perubahan signifikan yang mempengaruhi posisi Irak dalam geopolitik di Timur Tengah. Banyak indikator yang mempengaruhi adanya perubahan tersebut, yaitu seperti kondisi ekonomi, sosial, politik dan keamanan di Irak menjadi faktor dari adanya pergeseran dinamika serta hubungan diplomasi Irak dengan berbagai negara-negara tetangga. Dengan demikian, upaya apa yang dilakukan Irak pada era pasca Saddam Hussein untuk memulihkan hubungan diplomasi dengan negara-negara tetangga. Perlu diketahui bahwa Irak mengalami fase kemunduran pasca era Saddam Hussein, konflik dan kerusuhan sangat memberikan dampak negatif di berbagai aspek kehidupan yang ada di Irak. Lantas bagaimana tanggapan serta bentuk dukungan yang diberikan oleh negara-negara tetangga untuk Irak.

A. Bentuk Dukungan dari Berbagai Negara-Negara Tetangga

Irak mengalami berbagai ketidakstabilan dalam berbagai sektor, mulai dari sektor ekonomi, sosial, keamanan dan politik. Hal tersebut mendapat sorotan dari berbagai negara-negara tetangga yang merasa iba melihat ketidakstabilan Irak pasca jatuhnya rezim Saddam Hussein. Dengan demikian, segala bentuk dukungan pun muncul, mulai dari dukungan keamanan, ekonomi dan keuangan. Dukungan ini bentuk upaya dari berbagai negara untuk membantu Irak menjalani masa transisi akibat serta dari bantuan tersebut memupuk benih harapan agar Irak kembali menjadi negara yang aman dan sejahtera.

1. Implementasi Bantuan dan Dukungan Pada era Jalal Talabani

Berbagai dukungan yang diterima oleh Irak pada era Jalal Talabani mencakup berbagai hal, mulai dari bantuan ekonomi, bantuan militer dan keamanan serta bantuan kemanusiaan. Perihal bantuan militer dan keamanan, negara tetangga seperti Turki dan Iran sama-sama memberi bentuk dukungan dalam pertukaran informasi intelijen, hal tersebut dimaksud untuk membantu Irak dalam melawan ancaman terorisme serta mengamankan wilayah perbatasan.⁹⁸ Tidak hanya itu, upaya untuk meningkatkan skill bagi pasukan keamanan Irak juga diberikan, hal tersebut berguna untuk pasukan Irak dalam meningkatkan skill dalam berperang. Dalam hal tersebut juga sudah termasuk dengan adanya bantuan persenjataan.

Dalam aspek ekonomi, negara seperti Arab Saudi dan Kuwait memberikan bantuan berupa finansial dalam bentuk pinjaman, serta adanya donasi untuk Irak melakukan upaya rekonstruksi infrastruktur yang rusak akibat konflik dan membantu untuk memulihkan sektor ekonomi Irak. Dukungan berbentuk investasi pun juga bermunculan dari berbagai negara-negara seperti Iran, Turki, dan Arab Saudi.⁹⁹ Negara-negara tersebut terlibat dalam beberapa proyek investasi di sektor energi, pembangunan infrastruktur dan berbagai bidang industri lainnya yang ada di Irak.

Bantuan dalam hal kemanusiaan juga tak luput dari yang didapat oleh Irak. Hal tersebut sesuai dengan apa yang sedang dilanda oleh Irak, yang

⁹⁸ Budi Winarno, *Satu Dekade ...*, 118.

⁹⁹ Dlawer Ala'Aldeen, *Reconstructing Iraq ...*, 2.

dimana Irak dilanda ketidakstabilan akibat konflik yang menyebabkan banyak korban jiwa dan kekerasan merajalela di segala penjuru Irak. Faktor tersebut yang menjadikan adanya segala bentuk dukungan termasuk dari Turki, yang datang menghampiri Irak. Bantuan dari Turki tersebut ditujukan kepada para pengungsi dan para korban konflik yang mencakup dalam penyediaan bantuan makanan, obat-obatan dan berbagai dukungan lain bagi warga Irak yang terkena dampak.¹⁰⁰

Adanya berbagai dukungan dari negara-negara tetangga pada era Jalal Talabani memberikan dampak positif bagi Irak dalam upaya untuk memulihkan kondisi internal pasca konflik. Hal tersebut juga berdampak baik untuk memperkuat kerjasama dalam lingkup regional. Walaupun tidak dapat diidentifikasi apakah ada sebuah kepentingan dibalik dari bentuk dukungan yang diberikan dari negara-negara tetangga. Setidaknya bentuk dukungan tersebut telah menjadi hal positif bagi Irak untuk berupaya melakukan proses rekonstruksi serta pemulihan.

Namun, pada era Jalal Talabani, berbagai implementasi dari bantuan yang didapat dari negara-negara lebih ditekankan pada sektor ekonomi dan keamanan. Hal tersebut dikarenakan pada era Jalal Talabani, Irak dapat dikatakan secara keseluruhan belum stabil, oleh karena itu penekanan sangat difokuskan pada sektor ekonomi dan keamanan. Pada era tersebut Irak masih dalam kondisi siaga karena Al-Qaeda Irak yang dipimpin oleh Abu Musab

¹⁰⁰<https://www.antaraneews.com/berita/439418/turki-sediakan-bantuan-kemanusiaan-untuk-irak> (Diakses 25 Juni 2023 Pada Pukul 07.11 WIB).

Al-Zarqawi, namun pada tahun 2006 AQI berganti menjadi ISI (Islamic State Iraq) yang dipimpin Abu al-Baghdadi yang menggantikan Al-Zarqawi yang tewas pada tahun 2006.

Sedangkan penekanan dalam sektor ekonomi juga difokuskan sebab, tidak dapat dipungkiri bahwa pada era Jalal Talabani, Irak masih terseok-seok dalam memulihkan ekonomi. Hal tersebut dikarenakan berbagai infrastruktur penunjang yang rusak akibat konflik pasca invasi dan konflik dengan kelompok militansi.

Dengan adanya berbagai bantuan dari negara-negara tetangga, Irak pada era Jalal Talabani memastikan segala bentuk bantuan dapat tersalurkan ke sektor-sektor yang semestinya. Dalam proses penyaluran, juga terdapat proses transparansi dengan pengawasan serta laporan untuk memastikan segala bentuk bantuan dikelola dengan baik dan sesuai dengan tujuan dari bantuan itu sendiri. Dengan langkah tersebut juga diharapkan dapat menjadi sebuah pembuktian bagi Irak untuk menunjukkan sikap jujur dalam pengelolaan bantuan yang bertujuan untuk efektivitas penggunaan bantuan tersebut.

2. Pengoptimalan Bantuan dan Dukungan Pada Masa Fuad Masum

Pada era presiden Fuad Masum, Irak juga mendapat hal serupa yaitu bentuk dukungan dari berbagai negara-negara tetangga di Timur Tengah. Iran yang notabennya pernah ada sebuah cerita yang pilu dengan Irak, nyatanya Iran yang paling aktif dalam memberikan dukungan secara signifikan

terhadap Irak.¹⁰¹ Dukungan tersebut mencakup adanya kerjasama dalam sektor keamanan dan peningkatan militer. Hal tersebut bertujuan untuk Irak yang pada era Fuad Masum harus mengalami konflik dengan kelompok militan ISIS. Seperti halnya Iran yang memberikan dukungan dalam sektor keamanan, Turki pun juga melakukan hal serupa.

Turki memberikan dukungan ke Irak selama era Fuad Masum dengan memberikan sebuah informasi intelijen serta kerjasama militer dalam menumpas ancaman teroris di Irak. Hal tersebut dilakukan Turki dikarenakan apabila Irak mengalami kekalahan dari pasukan teroris ISIS, dapat menyebabkan kekacauan yang semakin meluas di kawasan timur tengah dan ditakutkan Turki juga terkena dampak tersebut. Selain bantuan keamanan dan militer, Turki juga ikut andil dalam memberikan bantuan pada ekonomi untuk rekonstruksi dan pembangunan ekonomi Irak.

Bentuk dukungan lainnya terus bermunculan seperti Arab Saudi dan Kuwait. Namun, sedikit berbeda dengan Turki dan Iran yang memberikan bantuan dalam hal keamanan serta militer. Arab Saudi dan Kuwait memberikan bantuan dalam bentuk finansial, hal tersebut bertujuan agar hubungan diplomatik menjadi lebih baik dan meningkatkan kerjasama ekonomi bilateral.¹⁰²

Pada era Fuad Masum, penekanan dan efektivitas segala bentuk bantuan dari berbagai negara terus dilakukan terlebih lagi pada era presiden

¹⁰¹ <https://www.brookings.edu/testimonies/prospects-for-increased-iranian-influence-in-iraq/>
(Diakses Pada 25 Juni 2023 Pukul 08.21 WIB).

¹⁰² Dlawer Ala'Aldeen, *Reconstructing Iraq ...*, 2.

Fuad Masum Irak mengalami konflik dengan pasukan militan ISIS. Dengan munculnya ISIS memberikan dampak buruk bagi Irak dan perkara itu juga berdampak pada stabilitas berbagai sektor di Irak. Oleh karena itu Fuad Masum menekankan efektifitas berbagai bantuan dari negara-negara tetangga. Langkah awal yang dilakukan oleh Fuad Masum untuk menekankan efektifitas adalah dengan melakukan komunikasi aktif atau hubungan diplomasi aktif dengan negara-negara tetangga untuk memastikan bantuan dan dukungan yang diterima tersebut efektif.

Fuad Masum juga mengupayakan adanya penyalarsan prioritas dan kepentingan Irak dengan negara-negara tetangga. Dalam konteks tersebut, Irak ingin memastikan bahwa segala bentuk bantuan dan dukungan dari negara-negara tetangga itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh Irak. Proses dari upaya ini menyangkut adanya pembicaraan secara berkelanjutan untuk benar-benar memastikan adanya pemahaman yang kuat dari Irak dan negara-negara tetangga mengenai titik fokus utama dari bantuan tersebut.

Fuad juga menjalin komunikasi yang erat dalam sektor keamanan dan intelijen terutama dengan Turki dan Iran yang memberikan sumbangih dalam peningkatan kekuatan keamanan Irak.¹⁰³ Dengan adanya pertukaran informasi dan adanya peleburan dalam upaya penanggulangan melawan ancaman militansi ISIS yang merajalela pada era Fuad Masum. Kerjasama tersebut sangat dibutuhkan oleh Irak pada era Fuad Masum untuk menumpas

¹⁰³<https://www.aa.com.tr/id/dunia/turki-kirim-tim-ahli-militer-ke-irak-untuk-bertugas-di-misi-nato/2124077> (Diakses Pada 25 Juni 2023 Pukul 14.18 WIB).

gerakan ISIS yang memberikan dampak negatif bagi seluruh aspek kehidupan yang ada di Irak.

Fuad Masum juga melakukan upaya yang sama seperti apa yang dilakukan presiden sebelumnya, yaitu mengupayakan adanya transparansi untuk benar-benar memastikan berbagai bantuan tersebut sudah sesuai dan tepat sasaran. Langkah tersebut sekali lagi menjadi upaya untuk memberikan rasa kepercayaan bagi negara-negara yang telah memberikan bantuan untuk memulihkan segala sektor kehidupan yang ada di Irak.

3. Presiden Barham Salih dalam Menyikapi Bantuan dan Dukungan

Era Barham Salih juga tak lupa mendapat dukungan dari negara-negara tetangga di Timur Tengah. Seperti Iran dan Turki yang masih konsisten membantu Irak dalam sektor keamanan, saling tukar informasi guna menghadapi ancaman teroris meskipun pada kurun waktu 2017. ISIS sempat dikalahkan pada era presiden Fuad Masum, namun kekalahan tersebut masih meninggalkan beberapa sisa-sisa kekuatan ISIS yang berkemungkinan dapat muncul ke permukaan kembali untuk menebar teror.¹⁰⁴ Juga tidak lupa kedua negara tersebut memberikan bantuan dalam sektor ekonomi Irak yang disebabkan konflik yang terus menerus ada di Irak yang seakan-akan telah menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Irak pasca era Saddam Hussein.

Arab Saudi, Kuwait, Uni Emirat Arab dan beberapa negara timur tengah juga tak lupa memberikan bentuk dukungan secara finansial terhadap

¹⁰⁴ Dlawer Ala'Aldeen, *Reconstructing Iraq ...*, 1.

Irak terutama pada era kepemimpinan Barham Salih.¹⁰⁵ Seperti halnya Kuwait yang menjadi negara tetangga tetap konsisten memberikan dukungan finansial kepada Irak untuk upaya rekonstruksi infrastruktur yang rusak, serta Arab Saudi dan beberapa negara tetangga lainnya yang memiliki substansi bantuan yang serupa. Substansi dari bantuan secara finansial tersebut adalah agar Irak dipermudah dalam segala proses rekonstruksi infrastruktur yang rusak. Terkhusus Arab Saudi juga meningkatkan kerjasama bilateral dalam sektor ekonomi dan investasi di berbagai sektor penting Irak seperti sumber daya energi dan beberapa sektor industri.

Barham Salih menekankan adanya transparansi dalam menggunakan bantuan yang diterima dari negara-negara lain. Barham Salih juga memastikan agar bantuan yang diterima harus digunakan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati. Dengan hal tersebut, Barham Salih ingin memastikan bahwa bantuan yang diterima dapat memberikan manfaat bagi pemulihan kesejahteraan Irak. Koordinasi terus ditingkatkan agar pengoptimalan penyaluran bantuan ke sektor-sektor yang membutuhkan diterima secara efisien.

Pemilahan juga dilakukan oleh Barham Salih, sektor-sektor strategis diprioritaskan untuk saluran bantuan dari negara-negara luar, sebab sektor strategis memiliki dampak yang signifikan bagi pembangunan infrastruktur, ekonomi dan sosial yang ada di Irak.¹⁰⁶ Pengawasan serta evaluasi juga

¹⁰⁵ Ibid., 1.

¹⁰⁶ Ibid., 4.

dilakukan oleh Barham Salih untuk memastikan segala bantuan yang diterima digunakan secara efisien dan sesuai dengan tujuan. Evaluasi secara berkelanjutan juga dilakukan untuk mengidentifikasi skala keberhasilan, kesalahan dan pembelajaran yang bisa diterapkan untuk mengoptimalkan penggunaan bantuan di masa mendatang.

Memang terlihat sama, realisasi bantuan dan dukungan yang diberikan dari beberapa negara tetangga, dan implementasi dari bantuan tersebut juga relatif tidak berbeda. Lantas, apa yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi, kenapa substansi dari bantuan tersebut terlihat sama. Alasan dari hal tersebut adalah adanya beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi. Adanya sebuah kontinuitas dari kebijakan tersebut, jadi meskipun ada pergantian kepemimpinan di Irak, tetap ada kebijakan yang mendasari hal tersebut untuk Irak tetap menjalin hubungan dengan negara-negara tetangga.

Irak memiliki kecenderungan untuk tetap memiliki kepentingan secara berkelanjutan dalam perihal bantuan untuk memulihkan Irak yang tidak stabil pasca konflik. Dengan tujuan untuk membangun kembali infrastruktur yang hancur akibat konflik, dan memperkuat sektor keamanan, oleh sebab itu bentuk dukungan dari negara-negara tetangga tetap konsisten untuk membantu serta mengatasi segala tantangan yang dihadapi oleh Irak.

Negara-negara tetangga juga menyadari bahwa mereka menghadapi problematika yang serupa dengan Irak, yaitu sama-sama memiliki ancaman terorisme yang berdampak pada stabilitas regional dan memiliki kepentingan ekonomi. Dengan demikian, negara tetangga memiliki kecenderungan untuk

memberikan dukungan terhadap Irak untuk melawan kelompok teroris, memberikan bantuan untuk rekonstruksi pembangunan negara, serta memperkuat keamanan regional.¹⁰⁷ Dengan adanya dukungan yang konsisten tersebut dapat menghasilkan kerjasama dan menciptakan stabilitas di kawasan timur tengah.

Faktor lain yang membuat adanya kecenderungan yang sama dari bentuk dukungan dan implementasi dari dukungan tersebut. Disebabkan Irak memiliki sumber daya alam yang melimpah, terkhususnya di sektor minyak. Dengan melimpahnya sumber daya energi telah menjadi sebuah daya tarik bagi negara-negara tetangga untuk memberikan bentuk dukungan terhadap Irak. Kerjasama ekonomi dan perdagangan dalam sektor ekonomi, investasi dan pembangunan infrastruktur telah menjadi sebuah landasan adanya kepentingan bersama dalam memanfaatkan potensi ekonomi yang dimiliki Irak dan meningkatkan kesejahteraan di Timur Tengah.

Hal ini merupakan tanda bahwasannya sebuah kepentingan dan adanya benefit dari langkah tersebut juga dapat membuat sebuah negara yang pada awalnya bersitegang, dapat menjalin kerjasama demi sebuah hubungan yang menguntungkan dari masing-masing pihak. Seperti halnya yang terjadi dengan Iran, Iran secara konsisten tetap memberikan bantuan dalam hal keamanan serta bantuan ekonomi.¹⁰⁸ Padahal, Irak dan Iran pernah mengalami konflik berkepanjangan yang menewaskan banyak korban jiwa. Hal tersebut juga

¹⁰⁷ Erwin Van Veen, "Regional Dynamics, Alliances and Power Politics", *A Brief analysis of the 2014 Political Security Crisis*, (-- 2014), 22.

¹⁰⁸ Ibid., 22.

menepis adanya anggapan di masa lalu bahwa Irak dan Iran memang sudah berdamai, namun tetap akan ada rasa dendam yang menyelimuti dua negara tersebut.

Secara keseluruhan berbagai bentuk dukungan yang didapat oleh Irak dari negara-negara tetangga memang patut diacungi jempol terutama dari negara-negara yang pada masa lampau sempat mengalami ketegangan serta konflik berkepanjangan dengan Irak. Namun, tetap ada berbagai macam spekulasi muncul dengan adanya dukungan yang diarahkan ke Irak. Spekulasi yang paling sering terdengar adalah dukungan yang diberikan memiliki makna tersirat. Yaitu, mencari sebuah keuntungan di Irak dikala kondisi mereka masih terbilang lemah akibat konflik yang terus berkelanjutan di negara tersebut. Setelah itu dengan lemahnya Irak, menjadi sebuah kesempatan bagi negara-negara yang memiliki hubungan dan kerjasama dengan Irak. Seperti memiliki akses secara langsung untuk meraup pundi-pundi keuntungan dalam hal sumber daya (peneliti tidak dapat memberikan referensi, sebab banyak artikel dari website yang telah dihapus).

B. Pemulihan Hubungan Diplomasi Irak

Dengan ketidakstabilan Irak dalam menjaga seluruh aspek kehidupan yang ada di negara tersebut, lantas menjadi sebuah persoalan yang besar dan timbul berbagai macam pertanyaan. Seperti halnya hubungan diplomasi Irak dengan berbagai negara tetangga terkhususnya di timur tengah. Apakah hubungan yang terjalin hanya sebatas dukungan yang diberi oleh negara-negara tetangga, atau ada upaya didalamnya untuk memperbaiki hubungan diplomasi

Irak dengan negara-negara tetangga. Perlu diketahui bahwasannya pada era Saddam Hussein, Irak benar-benar merupakan sebuah ancaman bagi negara-negara tetangga, seperti halnya yang terjadi pada era Saddam Hussein. Pada era tersebut Irak telah mengalami berbagai konflik dengan negara tetangga seperti Iran dan Kuwait. Lantas, bagaimana Irak melakukan upaya untuk memulihkan hubungan diplomasi dengan negara-negara tetangga pasca era Saddam Hussein.

1. Upaya Pemulihan Hubungan Diplomasi Pada Masa Jalal Talabani

Pada era presiden Jalal Talabani, Irak memiliki upaya untuk memperkuat hubungan dengan negara-negara Arab, seperti Arab Saudi, UEA, dan Kuwait. Hal ini ditandai dengan adanya kerja sama dalam sektor ekonomi.¹⁰⁹ Irak pada era Jalal Talabani juga melakukan upaya untuk menghapus stigma negatif yang melekat pada Irak dan membangun kembali kepercayaan dengan negara-negara Arab. Memang tidak mudah bagi Irak untuk meyakinkan negara-negara Arab agar dapat menghapus stigma masa lalu kelam yang ada pada Irak. Namun, hal tersebut menjadi sebuah hal yang harus segera diselesaikan oleh Irak agar dapat menumbuhkan rasa kepercayaan negara-negara Arab.

Selain itu, Irak pada era Presiden Jalal Talabani juga berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan Iran, memang Irak dan Iran pernah memiliki hubungan yang kurang baik pada masa lampau lebih tepatnya Irak yang masih berada di bawah kepemimpinan Saddam Hussein. Namun dengan adanya perubahan pasca Saddam Hussein lengser, Irak pada era Jalal Talabani ingin

¹⁰⁹ Dlawer Ala'Aldeen, *Reconstructing Iraq ...*, 2.

hubungan Iran dan Irak membaik.¹¹⁰ Walaupun hal tersebut masih terdapat pro kontra, setidaknya telah ada upaya yang baik dari Irak untuk membangun hubungan yang harmonis dengan Iran.

Tidak hanya dengan wilayah regional dan Arab. Irak juga berupaya memulihkan hubungan diplomasi mereka dengan negara-negara barat dan organisasi internasional lainnya. Komitmen yang diambil oleh Irak dengan melakukan kontak diplomatik dan memulihkan rasa kepercayaan serta memperkuat hubungan kerjasama dalam sektor ekonomi, keamanan dan rekonstruksi institusi. Irak juga berperan aktif dalam segala agenda yang diselenggarakan oleh organisasi internasional seperti PBB dan Liga Arab. Irak berharap dengan partisipasi yang dilakukannya mendapat dukungan serta menjadi langkah awal dari membangun hubungan baik dengan negara-negara anggota.

Penekanan terhadap kebijakan yang diambil Jalal Talabani untuk memperbaiki atau memulihkan hubungan diplomasi dengan berbagai sektor adalah dengan menjalin hubungan diplomasi multilateral dengan melakukan partisipasi aktif dalam segala bentuk forum-forum multilateral seperti forum tingkat tinggi dari PBB dan Liga Arab. Hal tersebut bertujuan untuk membangun kembali citra Irak serta dengan partisipasi tersebut Irak juga dapat mempromosikan isu-isu yang ada di Irak dan membangun kerjasama dengan negara-negara anggota untuk memulihkan stabilitas dan

¹¹⁰https://www.voaindonesia.com/a/iran_irak_perluas_kerjasama_bilateral_untuk_perdamaian_kawasan/178982.html (Diakses pada 25 Juni 2023 Pada Pukul 10.45).

pembangunan negara.¹¹¹ Memang terkesan seperti mengemis, dan aneh apabila hal tersebut dilakukan oleh Irak yang notabennya adalah negara kaya dengan sumber daya alam. Namun, kebijakan tersebut memang dilakukan oleh Jalal Talabani untuk memperbaiki citra Irak yang pada masa lampau seperti sebuah negara troublemaker atau negara yang dibenci oleh banyak pihak.

Kebijakan untuk membangun hubungan diplomasi yang baik juga dilakukan oleh Irak dengan mengambil langkah membangun hubungan diplomatik dengan negara-negara arab dan negara-negara barat. Untuk negara arab seperti yang dipaparkan di atas tadi oleh peneliti, konteksnya adalah bantuan dukungan yang merembet ke hubungan diplomatik. Jika dengan negara barat, seperti Amerika Serikat, inggris, prancis dan jerman. Konteks yang digunakan oleh Irak adalah menjalin komunikasi kerjasama dalam sektor keamanan, rekonstruksi dan investasi untuk membantu Irak menghadapi ancaman teroris serta memperkuat militer. Sedangkan dengan negara-negara eropa, isu yang digaungkan oleh Irak adalah membahas potensi terkait kerjasama dalam sektor ekonomi.¹¹² Hal ini dikarenakan Jalal Talabani menilai bahwa negara-negara eropa dapat menjadi mitra resmi Irak dalam upaya untuk membangun kembali ekonomi Irak yang terkena dampak akibat konflik.

¹¹¹ <https://www.voaindonesia.com/a/a-32-2008-09-25-voa8-85407837/64065.html> (Diakses Pada 25 Juni 2023 Pukul 16.10 WIB).

¹¹² Kenneth Kazman, *Iraq: Politics ...*, 39.

2. Kebijakan Fuad Masum dalam Pemulihan Hubungan Diplomasi

Pada era Fuad Masum, Irak tetap melakukan upaya untuk menjaga stabilitas dan hubungan baik dengan berbagai negara, terutama negara-negara di kawasan Arab. Upaya untuk memperbaiki hubungan diplomasi dilakukan dengan dialog diplomatik dengan negara-negara Arab seperti Arab Saudi, Kuwait dan Uni Emirat Arab.¹¹³ Langkah tersebut dilakukan untuk membangun kerjasama dalam sektor ekonomi dan politik serta menghapus stigma buruk Irak di masa lampau yang berkaitan dengan era kepemimpinan Saddam Hussein.

Irak juga melakukan langkah untuk memperbaiki hubungan dengan negara tetangga yang pernah memiliki latar belakang konflik yang berkepanjangan yaitu Iran. Meskipun Iran dan Irak mempunyai perbedaan dalam kebijakan regional, namun upaya tersebut terus dilakukan untuk membangun hubungan diplomatik yang jauh lebih baik. Hal tersebut ditandai dengan bergantinya dua negara tersebut dalam kunjungan bilateral dan adanya peningkatan kerjasama dalam sektor ekonomi dan keamanan.¹¹⁴

Irak pada era Fuad Masum juga memiliki peran dalam pembentukan pasukan koalisi internasional yang bertujuan untuk melakukan perlawanan dengan kelompok ekstremis ISIS. Irak membangun kerjasama dengan negara lain seperti Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa untuk memerangi serta mengalahkan pasukan militansi ISIS untuk mengembalikan stabilitas di

¹¹³ <https://www.middleeastmonitor.com/20180402-iraq-keen-to-maintain-strong-relations-with-saudi-arabia/> (Diakses pada 25 Juni 2023 Pada Pukul 10.50).

¹¹⁴ Erwin Van Veen, *Regional Dynamics* ..., 22.

wilayah tersebut.¹¹⁵ Irak pada era Fuad Masum juga sering kali terlibat aktif dalam forum-forum internasional, seperti forum PBB dan forum dari Liga Arab. Dengan adanya partisipasi tersebut, menunjukkan adanya upaya dari Irak untuk membangun hubungan diplomatik dengan negara-negara lain serta mempromosikan isu-isu penting yang sedang terjadi di Irak.

Meskipun upaya pemulihan hubungan diplomasi terus dilakukan oleh Fuad Masum, namun situasi di Irak tetap dipenuhi dengan tantangan keamanan dan tidak stabilnya kondisi politik di Irak. Namun, langkah-langkah tersebut sudah memberikan gambaran terkait upaya Irak untuk memulihkan kembali hubungan dengan negara-negara lain.

Dalam hal memulihkan hubungan diplomasi Irak dengan berbagai pihak, penekanan yang dilakukan adalah ikut berpartisipasi dalam forum-forum internasional agar menunjukkan integritas Irak sebagai negara yang berdaulat. Hal tersebut juga dimanfaatkan oleh Fuad untuk membangun kemitraan dengan negara-negara anggota PBB dan Liga Arab serta memperkuat posisi Irak dalam dunia Internasional.

Secara keseluruhan, fokus dari Fuad Masum dalam menanggapi bantuan dan upaya untuk memulihkan hubungan diplomasi Irak hanya terfokus pada kerjasama dalam sektor keamanan dan militer, serta juga memperkuat hubungan dengan berbagai pihak lain untuk bersama-sama menjaga stabilitas keamanan. Hal tersebut sudah jelas karena pada era Fuad

¹¹⁵ Ryan Crocker, "Long-Term Stability to Ensure the Defeat of ISIS", *Us National Security Interests in Iraq*, (-- 2017), 4.

Masum terjadi eskalasi konflik dengan militansi ISIS, oleh sebab itu segala bentuk fokus utama dan tujuan dari Fuad Masum hanya dalam perkara keamanan dan stabilitas bagi Irak.

3. Upaya Barham Salih Memperbaiki Hubungan Diplomasi Irak

Pada era Presiden Barham Salih, Irak terus melakukan upaya untuk memulihkan hubungan diplomasi dengan berbagai negara, terutama negara-negara tetangga. Seperti halnya era sebelumnya, pada era Barham Salih, Irak terus melakukan penguatan hubungan diplomasi dengan negara-negara Arab. Terutama pada era Barham Salih, Irak sedang berada dalam fase pemulihan akibat konflik dengan ISIS. Pertemuan kenegaraan dilakukan secara intens seperti dengan Arab Saudi, UEA, dan Kuwait. Hal tersebut juga dilandasi penguatan hubungan kerjasama dalam sektor ekonomi.¹¹⁶

Hal tersebut juga berlaku dengan Iran, Irak terus mengembangkan upaya untuk memperkuat hubungan dengan negara tetangga tersebut. Bahkan saat ada pertemuan Dewan Hubungan Luar Negeri Amerika Serikat, Barham Salih menyebut bahwa “Iran dan Irak tidak dapat dipisahkan begitu Saja”.¹¹⁷ Dengan demikian menunjukkan bahwasannya Irak pada era Presiden Barham Salih benar-benar ingin memperbaiki hubungan dengan Iran. Meskipun kedua negara tersebut masih memiliki perbedaan dalam cara pandang dalam menyikapi situasi yang ada di regional. Namun, hal tersebut tidak dijadikan alasan untuk kedua negara tersebut memperkuat hubungan diplomasi.

¹¹⁶ Dlawer Ala' Aldeen, *Reconstructing Iraq ...*, 1.

¹¹⁷ <https://www.cfr.org/event/conversation-president-barham-salih-iraq-0> (Diakses Pada 25 Juni 2023 Pukul 15.45 WIB).

Irak pada era Barham Salih juga terus membangun hubungan yang baik dengan negara-negara barat seperti Amerika dan negara-negara eropa lainnya.¹¹⁸ Dialog politik dan kerjasama dalam sektor ekonomi menjadi titik sentral dalam upaya memperbaiki hubungan tersebut. Hal tersebut dilakukan Irak dikarenakan Irak yang ingin memperbaiki citra negara yang pada saat era Fuad Masum layaknya menjadi sebuah negara yang menyeramkan, karena konflik dan peperangan sudah menjadi sebuah reka adegan yang dipertontonkan setiap harinya.

Berbagai cara untuk memperbaiki hubungan dengan berbagai pihak terus dilakukan oleh Irak. Irak sangat aktif berpartisipasi dalam berbagai forum internasional seperti forum yang diadakan PBB dan Liga Arab. Upaya-upaya terus dilakukan untuk memperbaiki citra Irak yang sedang jatuh serta mempromosikan upaya perdamaian, keamanan dan pembangunan Irak. Hal tersebut terkesan seperti Irak meminta belas kasih terhadap negara-negara lain untuk pembangunan negara yang hancur akibat konflik yang tak pernah usai di Irak.

Penekanan yang dilakukan dalam hal pemulihan hubungan diplomasi, langkah yang diterapkan oleh Barham Salih adalah meningkatkan kunjungan kenegaraan untuk membahas upaya dalam perbaikan hubungan bilateral. Melalui dialog secara langsung dan kontak diplomasi, Barham Salih mengupayakan untuk mengesampingkan perbedaan dan meningkatkan

¹¹⁸ Ibid.

intensitas kerjasama.¹¹⁹ Secara umum, Irak pada era Barham Salih terus menyuarkan kerjasama dan menyingkirkan adanya ketegangan dengan pihak manapun, sebab ketika Barham Salih menjadi presiden, Irak masih mengalami fase pemulihan akibat konflik dengan ISIS.

C. Isu Politik yang Muncul di Irak dari Masa Transisi Hingga Masa Kini

Sebuah hal yang tidak dapat dipungkiri bahwasannya Irak merupakan negara yang penuh dengan problematika. Terhitung sejak era transisi yang dipimpin oleh Ghazi al-Yawer hingga dilanjutkan oleh Jalal Talabani, Fuad Masum dan Barham Salih selalu dipenuhi isu-isu yang mengakibatkan serangkaian konflik yang berdampak pada instabilitas Irak.

1. Tantangan Keamanan Irak Pada Era Transisi Ghazi al-Yawer

Serangkaian problematika menyelimuti Irak pada era transisi yang dipimpin oleh Ghazi al-Yawer sebagai presiden sementara Irak. seperti halnya permasalahan keamanan yang ada pada era Ghazi al-Yawer, yang pada era tersebut bermunculan serangkaian ancaman terorisme. Pada era tersebut terdapat kelompok ekstremis Sunni yaitu Al-Qaeda Iraq (AQI) yang dipimpin oleh Abu Musab al-Zarqawi. Tujuan dari AQI melakukan serangkaian teror adalah untuk mengusir para pasukan asing yang menduduki Irak.¹²⁰ Salah satunya adalah keberadaan Amerika Serikat yang menetap di Irak untuk mengawasi serta perkembangan sistem pemerintahan Irak yang sedang kosong akibat tertangkapnya Saddam Hussein.

¹¹⁹ Ibid.

¹²⁰ Kenneth Kazman, *Iraq: Politics ...*, 9.

Dengan keberadaan Amerika Serikat di Irak, AQI melakukan serangkaian serangan yang diarahkan ke pasukan Amerika Serikat untuk memberikan efek jera agar mereka segera angkat kaki dari Irak, dan AQI dapat segera merealisasikan sistem pemerintahan yang sesuai dengan ideologi mereka. AQI memiliki tujuan untuk mendirikan sistem pemerintahan yang memiliki implementasi dari pemikiran mereka sendiri tentang Islam. Oleh sebab itu AQI melancarkan serangkaian teror untuk membuat kacau kondisi Irak yang memiliki substansi agar pasukan asing segera keluar dari Irak.

Pertentangan sektarian di Irak antara sunni dan syiah juga menjadi target dari AQI untuk semakin memperkeruh hubungan dari dua kelompok tersebut yang bertujuan agar memicu konflik antar kelompok. Berbagai ancaman juga diarahkan kepada para masyarakat, serangkaian aksi bom bunuh diri dan bom mobil yang bertujuan agar Irak menjadi tidak stabil.¹²¹ Serangkaian teror tersebut juga memiliki makna lain, bahwasannya hal tersebut dilakukan oleh AQI agar mendapat pengakuan dan mampu menarik dukungan dari orang-orang. Dengan serangkaian aksi teror yang terorganisir dan begitu mengerikannya dapat meningkatkan profil dari AQI itu sendiri. Walaupun untuk meningkatkan value mereka sebagai kelompok yang ingin mendirikan sebuah sistem pemerintahan, tentu apabila menggunakan cara kekerasan tidak dapat dibenarkan, sebab Islam tidak pernah mengajarkan kekerasan.

¹²¹ http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/3720161.stm (Diakses pada tanggal 26 juni 2023 pukul 21.59 WIB).

Secara keseluruhan, tujuan dari AQI adalah mengacaukan sistem roda pemerintahan transisi yang dibuat oleh Amerika Serikat dengan melakukan serangkaian teror untuk menciptakan ketidakstabilan pada sektor ekonomi, politik dan sosial. Namun perlu ditekankan lagi bahwasannya cara yang dilakukan oleh AQI untuk mendirikan sebuah negara dengan sistem pemerintahan Islam sangat tidak mencerminkan sifat seorang muslim yang tidak pernah memaksa atau menggunakan cara kekerasan untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan.

2. Konstelasi Politik Periode Kedua Jalal Talabani

Pada masa presiden Jalal Talabani, Irak masih menghadapi instabilitas dalam berbagai sektor, dalam perkara ancaman teroris juga masih bermunculan. Namun, pada era Jalal Talabani, isu yang mencuat ke permukaan adalah perselisihan politik yang mengakibatkan ketegangan sosial dari sunni dan syiah. Perselisihan politik tersebut sampai mengakibatkan pemilu pada tahun 2010 di Irak harus ditunda akibat adanya berbagai pergolakan, alhasil dengan adanya ketidakstabilan tersebut membuat Jalal Talabani yang notabennya sudah memasuki masa akhir dari jabatannya, harus melanjutkan tugas dia sebagai presiden Irak sampai 2014.¹²² Hal tersebut dikarenakan perselisihan politik menyebabkan kekosongan kekuasaan yang pada akhirnya membuat Jalal Talabani harus mengisi kekosongan tersebut.

Perselisihan sektarian yang mengarah ke politik juga ditandai dengan adanya kelompok pasukan mahdi yang dipimpin oleh Muqtada Al-Sadr.

¹²² Kenneth Kazman, *Iraq: Politics ...*, 8.

Pasukan mahdi awalnya hanya sebuah pengikut dari Muqtada Al-Sadr yang seorang ulama syiah, namun semakin lama semakin berkembang menjadi sayap militer dari organisasi Sadrist.¹²³ Pasukan mahdi didirikan dengan tujuan untuk melindungi masyarakat syiah di Irak dari ancaman pasca invasi, terutama dari pasukan Amerika Serikat dan kelompok ekstremis sunni. Pasukan mahdi ikut andil dalam konflik sektarian dengan sunni, namun pasukan mahdi dapat dikatakan menjadi kelompok milisi Irak yang memiliki pengaruh di Irak karena memiliki kekuatan militer yang bagus.

Pasukan mahdi juga berperan dalam penarikan pasukan AS di Irak pada tahun 2011. Muqtada Al-Sadr menginginkan Irak menjadi negara yang independen tanpa ada campur tangan dari negara-negara manapun terutama Iran dan Amerika Serikat. Cukup unik apabila melihat kasus dari Al-Sadr ini, sebab dia tidak mau negara Iran yang mayoritas syiah itu ikut campur tangan dalam segala sektor kehidupan di Irak terutama dalam sektor pemerintahan. Tuntutan agar Amerika Serikat menarik diri dari Irak ditandai dengan adanya aksi demonstran dari pasukan mahdi, dan Muqtada al-Sadr juga bersikeras agar Amerika Serikat segera menarik mundur pasukannya dari Irak.¹²⁴

3. Konflik Dengan ISIS Pada Periode Fuad Masum

Pada era Fuad Masum, perkara yang sangat teramat mainstream terdengar adalah, peperangan Irak yang dibantu pasukan koalisi melawan ISIS. Tentu hal tersebut menjadi sebuah *hot news* di berbagai belahan dunia,

¹²³ Ibid., 11.

¹²⁴ Ibid., 11.

sebab kekejaman yang dilakukan, serangkaian serangan teroris dari ISIS benar-benar membuat gempar dunia internasional.¹²⁵ Oleh sebab itu, Irak meminta bantuan militer untuk menumpas gembong ISIS yang memberikan ketidakstabilan bagi Irak. Berbagai negara di timur tengah secara kompak juga memberikan dukungan terhadap Irak untuk mengalahkan pasukan ISIS, sebab apabila ISIS dapat menguasai Irak, dikhawatirkan hal tersebut juga akan merembet ke negara-negara timur tengah lainnya.

Pasukan Mahdi yang dipimpin oleh Moqtada al-Sadr juga ikut andil dalam upaya penumpasan ISIS, hal ini dikarenakan ISIS memberikan ancaman bagi stabilitas Irak dan pada dasarnya Moqtada al-Sadr tidak ingin ada siapapun yang dapat mengganggu Irak.¹²⁶ Oleh sebab itu Moqtada Al-Sadr turun tangan membantu pemerintahan Irak era Fuad Masum untuk mengalahkan ISIS, ditambah lagi adanya faktor identitas sunni dan syiah, ISIS yang merupakan mayoritas ekstremis sunni menjadi faktor juga bagi pasukan mahdi untuk menumpasnya, sebab dikhawatirkan keberadaan ISIS dapat mengganggu komunitas syiah yang ada di Irak.

4. Reunifikasi Irak dan Iran Pada Era Barham Salih

Pada era Barham Salih, dapat dikatakan Irak sedang mengalami masa pemulihan akibat konflik dengan ISIS, ISIS dikalahkan oleh pasukan koalisi pada tahun 2017. Oleh sebab itu, Irak sedang dalam tahap pemulihan dalam segala hal, terutama pemulihan dalam sektor hubungan diplomasi. Adanya

¹²⁵ <https://www.usip.org/iraq-timeline-2003-war> (Diakses Pada 27 Juni 2023 Pukul 07.04 WIB).

¹²⁶ Kenneth Kazman, *Iraq: Politics ...*, 11.

upaya untuk reunifikasi antara Iran dan Irak menjadi sebuah isu yang ramai di berbagai kalangan, sebab dua negara tersebut pernah memiliki hubungan yang tidak harmonis di masa lampau tepatnya Irak yang masih dipimpin oleh Saddam Hussein. Pada dasarnya, Barham Salih ingin membawa Irak menjadi negara yang stabil dan aman tanpa adanya peperangan. Hal tersebut menjadi faktor kuat Barham Salih untuk memperbaiki Irak dalam berbagai sektor, sebab apabila Irak masih dirundung konflik dengan pihak-pihak lain, tentu akan menjadi hambatan bagi pemulihan Irak.

Upaya perbaikan Irak dan Iran pada dasarnya sudah tercium sejak lama, terutama pasca Saddam Hussein digulingkan, Iran selalu memberikan dukungan bagi Irak walaupun ada desas-desus bahwasannya Iran membantu Irak agar memiliki akses untuk bisa mengendalikan sistem pemerintahan Irak melalui komunitas syiah yang ada di Irak. Namun hal tersebut tidak menjadi sebuah hambatan bagi Barham Salih untuk menutup komunikasi Irak dari negara-negara lain terkhususnya negara-negara tetangga. Bahkan saat ada pertemuan Dewan Hubungan Luar Negeri Amerika Serikat, Barham Salih menyebut bahwa “Iran dan Irak tidak dapat dipisahkan begitu Saja”.¹²⁷ Dengan demikian menunjukkan bahwasannya Irak pada era Presiden Barham Salih benar-benar ingin memperbaiki hubungan dengan Iran. Meskipun tetap ada pro kontra dari berbagai pihak, namun hal tersebut tidak dijadikan alasan untuk kedua negara tersebut memperbaiki hubungan diplomasi.

¹²⁷ <https://www.cfr.org/event/conversation-president-barham-salih-iraq-0> (Diakses Pada 25 Juni 2023 Pukul 15.45 WIB).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian mengenai “Instabilitas Politik Irak Pasca Masa Kepemimpinan Saddam Hussein 2003-2022” yang telah diuraikan sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Akar permasalahan konflik pada masa kepemimpinan Saddam Hussein didasari dengan adanya rezim pemerintahan yang otoriter, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan adanya kebijakan agresi militer terhadap negara-negara tetangga seperti Iran dan Kuwait. Pemicu utama dari tumbang rezim Saddam Hussein adalah invasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat pada tahun 2003, yang dipicu dengan adanya tuduhan terhadap rezim Saddam Hussein yang memiliki senjata pemusnah massal.
2. Setelah tumbang Saddam Hussein, Irak masih menghadapi tantangan besar dalam upaya rekonstruksi negara dan institusi pemerintahan. Berbagai periode pasca Saddam Hussein telah dilalui oleh Irak bahkan terhitung dari tahun 2003-2022 Irak telah mengalami pergantian presiden sebanyak 4 kali. Namun, dinamika terus terjadi di era pemerintahan presiden pasca Saddam Hussein, dinamika tersebut ditandai dengan adanya perubahan politik, konflik sektarian antara syiah dan sunni, serangan teroris dan instabilitas politik yang memberikan dampak buruk lali menyebar ke segala sektor kehidupan di Irak. Meskipun demikian, tetap ada beberapa kemajuan yang telah dicapai, seperti rekonstruksi infrastruktur yang rusak akibat konflik berkepanjangan, berhasil

menjalankan pemilihan umum walaupun terkadang pada momen tersebut juga menjadi akar memanasnya konflik sektarian, dan upaya membangun institusi demokrasi yang lebih baik.

3. Posisi geopolitik Irak pasca Saddam Hussein mengalami berbagai dinamika, namun Irak tetap menjadi negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah yaitu minyak. Namun, dengan melimpahnya kekayaan alam, tentu hal tersebut menjadi sebuah beban yang harus dipikul oleh Irak itu sendiri. Dengan adanya kekayaan tersebut, tantangan dalam menjaga kondisi stabilitas internal dan menyeimbangkan kepentingan regional dan internasional tentu akan semakin kencang arus hambatannya dan itu yang sedang terjadi di Irak sampai sekarang.

B. Saran

Peneliti teramat sangat sadar menulis demikian, peneliti sadar bahwasannya penelitian ini sangat jauh dari kata sempurna. Namun, setidaknya peneliti memberikan gambaran serta saran untuk para peneliti selanjutnya antara lain :

1. Penelitian yang membahas terkait Irak ataupun Saddam Hussein sudah banyak ditemukan. Walaupun mayoritas hanya berfokus pada sosok Saddam Hussein, dan berfokus pada invasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat di tahun 2003. Peneliti menyarankan untuk para peneliti selanjutnya agar berfokus pada 1 aspek saja. Sektor Keamanan Irak pasca Saddam Hussein sudah dapat memberikan pembahasan yang kompleks dan tidak ada habisnya. Begitu pula dengan sektor-sektor lainnya.

Daftar Pustaka

Buku

- Avruch Kevin and Christopher Mitchell. *Conflict Resolution and Human Needs*. Canada: Routledge Group, 2013.
- Azimi, Negar. *On Democracy By Saddam Hussein*. New York: Deste Foundation, 2012.
- Blaydes, Lisa. *State Of Under Saddam Hussein Repression*. United Kingdom: Pricenton University Press, 2018.
- Coughlin, Con. *Saddam His Rise and Fall*. New York: HarperCollins Publishers, 2005.
- Hybel, Alex Roberto. *The Bush Administrations and Saddam Hussein*. New York: Plagrove Macmillan, 2006.
- Jones, Seth. *Securing Health: Lessons from Nation-Building Missions*. tk: RAND Corporation, 2006.
- Kartodirdjo, Sartono. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Sejarah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- Nissen, Hans J. *From Mesopotamia to Iraq*. London: The University of Chicago Press, 2009.
- Sassoon, Joseph. *Saddam Hussein's BA'TH PARTY Inside an Authoritarian Regime*. New York: University Cambridge Press, 2012.
- Shields, Charles J. *Saddam Hussein Major World Leaders*. Philadelphia: Chelsea House Publishers, 2005.
- Zed Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta : yayasan obor Indonesia, 2004.

Jurnal

- Ala'Aldeen, Dlawer. "Reconstructing Iraq: Where Do We Stand?" *Policy Brief*, Vol. 4, No. 29, Maret 2019.
- Arosoaie, Aida. "Iraq" *Counter Terrorist Trends and Analyses*, Vol. 8, No. 1, Desember 2015.

Aryaputri Hafiza. "Invasi Pasukan Koalisi: Kebangkitan atau Keterpurukan Kehidupan Sosial-Politik Perempuan Irak" *Kajian Timur Tengah*, Vol. 7, No. 1, Juni 2015

Bensahel, Nora. "Governances and Political Reconstruction" *Prewar Planning and the Occupation of Iraq*, -- -- 2008.

Cordesman, Anthony H. "Putting American and Iraqi Failures in Perspective" *Stability and Progress*, -- --, Maret 2023.

Crocker, Ryan. "Long-Term Stability to Ensure the Defeat of ISIS" *US National Security Interests in Iraq*, -- -- 2017.

Hussain, Syed Rifaat. "Current Developments in Iraq and Future Dispensation" *Policy Perspective*, Vol. 7 No. 1, Juni 2010.

Kazman, Kenneth. "Iraq: Politics, Governance and Human Rights" *Congressional Research Service*, -- -- 2014.

Kuoti, Yasir. "After Kurdistan Referendum: Iraq's Road to Reconciliation" *MERI Policy Briefly*, Vol. 4, No. 13, Oktober 2017.

Mako, Shamiran. "Evaluating the Pitfalls of External Statebuilding in Post-2003 Iraq (2003-2021)" *Intervention and Statebuilding*, --, --, 2021.

Winarno, Budi. "Satu Dekade Pasca Invasi AS di Irak" *Jurnal Hubungan Internasional*, Vol. 3 No. 2, Oktober 2014.

Veen, Erwin Van. "Regional Dynamics, Alliances and Power Politics" *A Brief analysis of the Political Security Crisis*, -- -- 2014.

Internet

Oil for Food Program, <https://www.un.org/depts/oip/sector-food.html>. (Diakses tanggal 13 Juni 2023 Pukul 06.14 WIB).

Peringatan 20 Tahun invasi di Irak, <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-65200593> (Diakses tanggal 15 Juni 2023 Pukul 05.30 WIB).

Baghdad blast kills Iraq leader, http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/3720161.stm (Diakses pada tanggal 22 juni 2023 pukul 21.59 WIB).

The Silent Treatment, <https://www.hrw.org/report/2006/11/27/silent-treatment/fleeing-iraq-surviving-jordan> (Diakses pada Tanggal 23 Juni Pukul 03.25 WIB).

Moderate Kurd leader elected as Iraq President, <https://wayback.archive-it.org/all/20171010063651/http://www.iraqsun.com/news/224095839/moderate-kurd-leader-elected-as-iraq-president> (Diakses pada tanggal 23 Juni 2023 Pukul 12.56 WIB).

How Iraq can Move Beyond Oil Sector, <https://www.ispionline.it/en/publication/how-iraq-can-move-beyond-oil-sector-32014> (Diakses pada 24 Juni 2023 Pukul 22.00 WIB).

With Iraqi-Kurdish Talks Stalled, Phone Diplomacy Averts New Clashes, <https://www.nytimes.com/2017/11/12/world/middleeast/iraq-kurds-autonomous-borders.html> (Diakses pada 24 Juni 2023 Pukul 21.00 WIB).

Barham Salih, <https://worldleaders.columbia.edu/directory/dr-barham-salih> (Diakses pada 25 Juni 2023 Pukul 04.49 WIB).

Turki Sediakan Bantuan Kemanusiaan Untuk Irak, <https://www.antaraneews.com/berita/439418/turki-sediakan-bantuan-kemanusiaan-untuk-irak> (Diakses 25 Juni 2023 Pada Pukul 07.11 WIB).

Prospects for Increased Iranian Influence in Iran <https://www.brookings.edu/testimonies/prospects-for-increased-iranian-influence-in-iraq/> (Diakses Pada 25 Juni 2023 Pukul 08.21 WIB).

Turki Kirim Tim Ahli Militer ke Irak untuk bertugas dalam Misi NATO, <https://www.aa.com.tr/id/dunia/turki-kirim-tim-ahli-militer-ke-irak-untuk-bertugas-di-misi-nato/2124077> (Diakses Pada 25 Juni 2023 Pukul 14.18 WIB).

https://www.voaindonesia.com/a/iran_irak_perluas_kerjasama_bilateral_untuk_perdamaian_kawasan/178982.html (Diakses pada 25 Juni 2023 Pada Pukul 10.45).

<https://www.voaindonesia.com/a/a-32-2008-09-25-voa8-85407837/64065.html> (Diakses Pada 25 Juni 2023 Pukul 16.10 WIB).

<https://www.middleeastmonitor.com/20180402-iraq-keen-to-maintain-strong-relations-with-saudi-arabia/> (Diakses pada 25 Juni 2023 Pada Pukul 10.50).

Pidato Presiden Irak Barham Salih, <https://www.cfr.org/event/conversation-president-barham-salih-iraq-0> (Diakses Pada 25 Juni 2023 Pukul 15.45 WIB).

http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/3720161.stm (Diakses pada tanggal 26 juni 2023 pukul 21.59 WIB).

Irak Sejak 2003, <https://www.usip.org/iraq-timeline-2003-war> (Diakses Pada 27 Juni 2023 Pukul 07.04 WIB).

Skripsi

Winanda, Vergie, Skripsi. *Sejarah Perkembangan Partai Baath di Irak Pada Masa Kepemimpinan Saddam Hussein Tahun 1979-2003*. Yogyakarta : Universitas Negeri Yogyakarta, 2015.

Tesis

M, Yusuf Solichien, Tesis. *Kerjasama PBB-Amerika Serikat dalam Penyelesaian Kasus Invasi Irak Terhadap Kuwait (Tahun 1990-1991)*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2008.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A